

**POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP
PEKERJA ANAK TAHUN 2010-2018**

SKRIPSI



Oleh:

FANDY TAMARA

15323079

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP
PEKERJA ANAK TAHUN 2010-2018**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hubungan Internasional
Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP PEKERJA
ANAK TAHUN 2010-2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh
Derajat S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal


23 September 2020

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



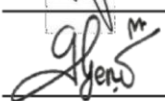
Ketua Program Studi


Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
3. Gustrieni Putri, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fandy Tamara
No. Mahasiswa : 15323079
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Politik Kebijakan Pemerintah India Terhadap Pekerja Anak Tahun 2010-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang di tetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 September 2020

Yang Menyatakan,




Randy Tamara

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan untuk saya hingga mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan cintai, yang selalau memberikan motivasi dalam hidup saya untuk terus berjuang.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Terima kasih atas doa serta dukungan yang tidak pernah putus diberikan untuk anakmu ini. Terima kasih telah membimbing anakmu ini sampai pada tahap ini.

Terima kasih atas cinta kasih dan pengorbanan yang telah dilakukan selama ini. Sebagai tanda bakti, hormat terima kasih kupersembahkan karya ini untuk Ayah dan Ibu. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bangga dan bahagia. Terima Kasih ayah dan Ibu.

Kakak dan adik Tercinta

Terima kasih untuk kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk berjuang menyelesaikan tanggungjawab. Walaupun tidak sering berkomunikasi tapi rasa cinta dan kasih sayang tidak akan pernah surut untuk saling melengkapi dan melindungi satu sama lain. Terima kasih atas segala masukan dan pertolongan yang selama ini telah diberikan. Semoga kita bisa menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua.

HALAMAN MOTTO

Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya.

Tidak perlu tergesa-gesa, sudah ada rejekinya. Bersabarlah.

- *noname2609 a.k.a Fandy tamara* -



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancara, kemudahan serta kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.A., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B. Int., M.A., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, kesabaran dan motivasi yang telah di berikan selama masa perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi penulis banyak melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Semoga Bapak selalu di berikan kesehatan oleh Allah SWT
3. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.ST., M.A., selaku Kaprodi serta dosen-dosen HI UII Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Bapak Geraldi Yudhistira, S.Sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Bapak Hasbi Aswar S.IP., M.A., Willi Ashadi, S.H.I., M.A., Muhammad

Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D., Masitoh Nur Rohma S.Hub. Int., M.A., Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc. Terima kasih atas segala ilmu, arahan dan kesabarannya selama masa perkuliahan. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

4. Kedua orang tua Ayah Taurisman Syamsudin dan Ibu Mardiana yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan bagi penulis untuk terus berjuang dalam setiap proses kehidupan yang di jalani oleh penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang selalu di berikan untuk dapat menyekolahkan penulis sampai saat ini, agar penulis dapat menjadi orang yang berguna serta bermanfaat kedepannya. Terima kasih untuk setiap kepedulian yang kalian berikan, semoga kalian selalu di berikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.
5. Kakak Fanji Tamara dan Adik Fanny Tamara yang selalu membantu memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi Kakak dan Adik yang baik untuk saya.
6. Keluarga Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Jogjakarta (KPMKR-KKJ), Sanggar Selendang Delime (SSD) dan Asrama Karimun Jogjakarta (AKJ) yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar berorganisasi, memimpin, dan menjadi kakak sekaligus adik yang mampu membimbing dan dibimbing selama hidup di Jogjakarta,

dapat mengembangkan potensi dalam diri untuk menjadi bekal dan pengalaman dalam kehidupan saya berikutnya. Jaya selalu KPMKR-KKJ.

7. Teman-teman Seperjuangan Bakol angkatan 2015, Sugeng Wahyu Pratama, Muhammad Arzuansyah, Aziz Efendi Lubis, Apria Riko Tranjaya, Mukiran, Asria Turasih, Lutvi Rizakawati, Cici Hardianti, Krisna Yuda, Heri Prasetya, Agus Setio Widodo dan teman-teman seperjuangan lainnya yang menjadi teman berpikir, berdiskusi dan hal baik lainnya untuk kemajuan bersama selama di Jogjakarta. Semoga kita selalu di berikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT untuk dapat berkumpul kembali di kesempatan yang lain.
8. Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) UII Periode 2017 yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat bergabung dan memepelajari banyak hal selama berada di KOMAHI UII. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat dan kita selalu senantiasa di berikan Kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
9. Teman-teman seperjuangan HI UII angkatan 2015 yang selalu menemani dan memberikan semangat selama lebih dari 4 tahun ini. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis, terima kasih atas perjuangan bersama kita baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Sukses selalu untuk kalian semua.
10. Nyak Benaceh yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi adik, teman dan sahabat yang baik.

Semoga kita menjadi lebih baik lagi kedepannya serta diberikan perlindungan serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.

11. Terima kasih kepada Kunto Aji, Baskara Putra (Hindia), Pamungkas, Sal Priadi, Nadin Amizah, Adhitia Sofyan dan musisi lainnya yang telah memberikan motivasi melalui karya yang kalian buat, menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi dan permasalahan dalam menjalani kehidupan. Semoga karya-karya kalian lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang.

12. Semua pihak yang telah mendoakan penulis selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua doa, dukungan, motivasi dan masukan yang telah di berikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak baik yang sudah disebutkan maupun belum disebutkan yang sudah banyak berkontribusi dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr,Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Signifikansi Penelitian.....	6
1.5. Cakupan Penelitian.....	7
1.6. Tinjauan Pustaka	9
2. Landasan Teori/Konsep/Pendekatan.....	13
3. Metodologi.....	20
BAB II	23
ALTERNATIF KEBIJAKAN TERHADAP PEKERJA ANAK	23
2.1. Kebijakan Mengizinkan Anak Dibawah 14 Tahun Untuk Bekerja di Sektor Informal	24
2.2. Kebijakan Larangan Anak dibawah Umur 14 Tahun Bekerja.	27
2.3. Kebijakan Pengembangan dan Pelatihan Kejuruan.....	33
2.4. Kebijakan Pendidikan Gratis Untuk Anak-anak Mendapatkan Pendidikan Formal	37
BAB III	42
ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PEKERJA ANAK	42
3.1. Konsekuensi (<i>Cost & Benefit</i>) Pilihan Kebijakan Mengizinkan Anak dibawah 14 Tahun untuk Bekerja di Sektor Informal	43

3.1.1.	Ekonomi	43
3.1.2.	Politik	48
3.1.3.	Sosial	51
3.2.	Konsekuensi (Cost & Benefit) Pilihan Kebijakan Larangan Anak dibawah Umur 14 Tahun untuk Bekerja	53
3.2.1.	Ekonomi	53
3.2.2.	Politik	55
3.2.3.	Sosial	57
3.3.	Konsekuensi (Cost & Benefit) Kebijakan Pengembangan dan Pelatihan Kejuruan	59
3.3.1.	Ekonomi	59
3.3.2.	Politik	61
3.3.3.	Sosial	62
3.4.	Konsekuensi (Cost & Benefit) Kebijakan Pendidikan Gratis untuk Anak-anak Mendapatkan Pendidikan Formal	66
3.4.1.	Ekonomi	66
3.4.2.	Politik	68
3.4.3.	Sosial	70
BAB IV	78
KESIMPULAN	78
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Table 1. Perkiraan Cost and Benefit Kebijakan Pekerja Anak di India.....	16
Table 2. Hasil Ujian (Pendidikan Sekolah): <i>Open Board</i>	46
Table 3. Hasil Ujian (Pendidikan Tinggi): 2015-2016.....	46
Table 4. <i>National Career Services 2020</i>	47
Table 5. Perkiraan <i>cost – benefit</i> jika pemerintah India mengizinkan perkeja anak... 52	
Table 6. Perkiraan <i>cost – benefit</i> jika pemerintah India melarang seluruh bentuk aktivitas pekerja anak.....	58
Table 7. Perkiraan <i>cost & benefit</i> jika pemerintah menerapkan kebijakan pengembangan dan pelatihan kejuruan di India.....	65
Table 8. Perkiraan <i>cost & benefit</i> jika pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan gratis di India.....	71
Table 9. Kompilasi opsi alternatif kebijakan beserta <i>cost & benefit</i>	73



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan pemerintah India mengurangi pekerja anak di India. Pekerja anak merupakan suatu permasalahan yang kompleks untuk dapat di selesaikan, Kemiskinan menjadi faktor utama penyebab pekerja anak terjadi di India. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah India dengan tetap mengizinkan pekerja anak pada sektor informal pada tahun 2014 menjadi kritik terhadap pemerintah India yang tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan dengan model aktor rasional untuk menjawab mengapa pemerintah India mengeluarkan kebijakan mengizinkan pekerja anak pada sektor informal.

Kata Kunci: Pekerja anak, Kemiskinan, Pendidikan, Pemerintah India.

ABSTRACT

This research analyzes the Indian government's policy to reduce child labor in India. Child labor is a complex problem that needs to be solved. Poverty is the main driver of child labor in India. The Indian government's policy of continuing to allow child labor in the informal sector in 2014 has become a criticism of the Indian government for not taking the problem of child labor seriously. In this study, researchers used decision making theory with a rational actor model to answer why the Indian government issued a policy to allow child labor in the informal sector.

Keywords: Child Labour, Poverty, Education, Government of India

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerja anak banyak terjadi di berbagai benua atau negara-negara di dunia disebabkan oleh beberapa indikator seperti salah satu faktor utamanya adalah kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi mengakibatkan keluarga miskin banyak mengirim anak-anak mereka bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Indikator lainnya yang mempengaruhi adalah tidak adanya kewajiban untuk mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas, buruknya sistem pendidikan yang berdampak tingginya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan, kemiskinan keluarga dan kurangnya pendapatan keluarga, kesempatan kerja dan upah yang kurang layak bagi orang dewasa, kurangnya penegakan hukum dan peraturan ketenagakerjaan serta lemahnya upaya pemerintah dalam penegakan peraturan perundang-undangan. (Wintour, 2013, pp. 11-12)

Pekerja anak memiliki konsekuensi yang negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak untuk kemajuan individu dikarenakan keterampilan yang rendah dan peluang mendapatkan kesempatan kerja yang buruk. Konsekuensi ekonomi akan terjadi ketika pekerja terus menerus mempertahankan tenaga kerja yang tidak terampil dan memiliki produktivitas yang rendah. Risiko lainnya adalah pekerja anak menjadi rentan terhadap eksploitasi dan memiliki keterampilan hidup yang terbatas. (Wintour, 2013, pp. 13-14).

Konvensi PBB tentang hak anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun. Pekerja anak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh anak dibawah usia kerja minimum yang ditetapkan oleh suatu negara sesuai dengan konvensi (*International Labour's Organization*) ILO 138, umumnya usia 14 atau 15 tahun dengan kemungkinan pengecualian untuk pekerjaan ringan (Wintour, 2013, p. 8). Metode yang paling efektif untuk memastikan anak-anak tidak mulai pekerjaan dalam usia yang terlalu muda adalah menetapkan batasan usia bagi anak-anak hingga dapat dipekerjakan secara legal. Tujuan dari konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum adalah penghapusan pekerja anak dengan mewajibkan negara untuk menetapkan usia minimum untuk masuk ke pekerjaan dan menetapkan kebijakan nasional untuk penghapusan pekerja anak.

India merupakan salah satu negara yang melakukan praktik pekerja anak. Pada tahun 2011 hingga 2012, dalam laporan yang diterbitkan oleh ILO mengatakan bahwa India telah melakukan praktik pekerja anak dengan total hingga 5.768.367 jiwa anak yang berusia dari 5 tahun hingga 17 tahun dengan berbagai latar belakang pekerjaan seperti sektor ekonomi dan industri dari berbagai pembagian batasan usia pekerja anak. (Lyon, 2015, p. 7). Berdasarkan sensus yang dilakukan di India pada tahun 2011 menyebutkan lebih dari 10,1 juta anak dibawah 14 tahun terlibat dalam pekerja anak dimana 5,6 juta laki-laki dan 4,5 juta perempuan dari 152 juta anak di India. Satu dari sepuluh anak diseluruh dunia. India sendiri telah meratifikasi konvensi ILO 138 sebagai bentuk dukungan

terhadap ILO untuk mengurangi jumlah pekerja anak di dunia dan India telah menetapkan batasan usia minimal bagi anak-anak untuk dapat dipekerjakan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat praktik pekerja anak yang terjadi di India yang bertentangan dengan Konvensi ILO 138.

Dalam hukum dan peraturan tentang bentuk terburuk dari pekerja anak yang diterapkan oleh India, anak dari berbagai usia dapat dipekerjakan selama mematuhi batasan kerja bagi anak-anak seperti beberapa diantaranya batas jam kerja maksimum 6 jam dengan 1 jam masa istirahat dan paling sedikit 1 hari libur dalam seminggu dan tidak ada kerja malam atau lembur. Dalam peraturan dan larangan (*Prohibition and Regulation*) Act, anak dibawah 14 tahun dilarang dalam pekerjaan yang berbahaya. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman penjara (United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs, 2012). Perundang-undangan yang diterapkan atau berlaku di India tentunya bertentangan dengan dengan tujuan ILO dalam konvensi 138 yang berusaha menghapuskan pekerja anak di dunia dan menerapkan pada negara-negara yang meratifikasi.

Sedikitnya minimal 8 juta pencari kerja baru memasuki pasar kerja setiap tahunnya di India. Pada tahun 2017, hanya 5,5 juta lapangan pekerjaan yang telah dibuat dan situasinya terus memburuk dan menjadi tertinggi dalam 45 tahun terakhir di India. Pemuda India menjadi korban dengan tingkat pengangguran mencapai 34 persen diantara usia 20-24 tahun pada kuartal 2019. Menurut Survei Angkatan Kerja Periodik 2018 (PLFS), tingkat pengangguran di kalangan kaum

urban 15-29 tahun adalah 23,7 persen (Ministry of Statistic and Programme Implementation, 2019). Beberapa hipotesis mengatakan bahwa pengangguran yang meluas ini disebabkan oleh pelatihan yang buruk. PLFS pada akhir 2018 mengungkapkan bahwa 33 persen dari anak usia 15-29 tahun yang dilatih secara formal tidak memiliki pekerjaan. pada 2014, Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India menciptakan Kementerian Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan untuk diselaraskan proses pelatihan, penilaian, sertifikasi dan untuk mengembangkan *Institutions Training Industry* (ITI) (Christophe, 2019).

Dalam rekomendasi No. 146 dari konvensi ILO No. 138 menekankan bahwa kebijakan dan rencana nasional harus menyediakan pengentasan kemiskinan dan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa agar orang tua tidak mengirimkan anak-anak untuk bekerja, pendidikan wajib dan penyediaan pelatihan kejuruan, perluasan jaminan sosial dan fasilitas yang sesuai untuk perlindungan anak-anak dan remaja yang bekerja. Dalam upaya untuk menghapus pekerja anak, undang-undang yang berlaku dalam negara harus ditetapkan usia minimum bekerja sebagai respons dari negara untuk mengurangi pekerja anak. Dalam peraturan dan larangan (*Prohibition and Regulation*) Act yang berlaku di India, batas usia minimum sebagaimana yang tertera dalam rekomendasi No.146 konvensi ILO 138 telah dilaksanakan dan telah dimasukkan dalam perundang-undangan India, namun penerapannya dalam kehidupan bernegara banyak terjadi pelanggaran dari tujuan di adakannya konvensi 138.

Pada tahun 2016 pemerintah India melalui kementerian hukum mengeluarkan pembaruan dari undang-undang *The Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Act* tahun 2016 yang tetap mengizinkan anak dibawah umur 14 tahun diperbolehkan untuk bekerja pada sektor informal atau dalam hal ini adalah keluarga besar. Undang-undang ini menimbulkan berbagai kritik terhadap pemerintah India yang semulanya berupaya untuk mengurangi pekerja anak justru membuat peraturan yang dapat menyebabkan bertambahnya jumlah pekerja anak di India. Organisasi internasional seperti UNICEF, ILO dan lembaga-lembaga yang memperhatikan tentang pekerja anak banyak mengkritik hal ini yang berkemungkinan dapat menyebabkan meningkatnya kasus pekerja anak yang terjadi di India dan mempromosikan anak untuk bekerja. Meskipun peraturan perundang-undangan ini banyak mendapat penolakan dan kritik dari dunia internasional namun undang-undang ini tetap dijalankan oleh pemerintah India. Setelah undang-undang tentang pendidikan *Right to Education Act (RTE) Act* tahun 2009 pekerja anak turun dari 12,6 juta pada 2001 menjadi 4,3 juta pada 2014, hal ini akan merusak dan menjadi kemunduran berbagai upaya mengurangi pekerja anak (Sehgal, 2015).

Berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional dan kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah India, peneliti berusaha menganalisis sebab alasan dikeluarkannya kebijakan yang menuai kritik dari berbagai pihak tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan, dalam pelaksanaan hasil konvensi ILO 138 yang telah diratifikasi oleh India masih terdapat praktik pekerja anak. kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India justru bertentangan dengan tujuan utama dari konvensi ILO yang telah diratifikasi. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan yang terjadi yaitu :

“Mengapa pemerintah India tetap mengizinkan anak dibawah usia 14 tahun bekerja pada sektor informal ?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penyebab di perbolehkannya anak dibawah usia 14 tahun bekerja pada sektor informal.
2. Menganalisis proses pengambilan keputusan hingga di berlakukannya kebijakan pemerintah India yang mengizinkan anak dibawah usia 14 tahun bekerja pada sektor informal.
3. Untuk mengetahui dampak dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah India terhadap pekerja anak di India

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih banyaknya kasus pekerja anak di India yang di pekerjakan secara paksa untuk pemenuhan ekonomi keluarga.

Banyak penyebab yang membuat pekerja anak sangat banyak terjadi di India seperti salah satunya tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini tentunya perlu di analisis secara mendalam untuk mengetahui alasan dan penyebab diberlakukannya Undang-undang tentang pekerja anak tahun 2016 yang mengizinkan anak untuk bekerja pada sektor informal upaya dan kebijakan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah India untuk menyelesaikan dan mengurangi jumlah pekerja anak di India.

Penelitian juga dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang MNC yang menggunakan pekerja anak di India yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah India dan mengenai pekerja anak yang terjadi di India, penelitian lain sebelumnya lebih berfokus pada upaya organisasi internasional seperti *International Labour Organizations* (ILO) atau pun *United Nation Children's Fund* (UNICEF) menyelesaikan kasus pekerja anak di India. Namun, pada penelitian ini akan berfokus pada sebab alasan pemerintah India mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada tahun 2016, proses pengambilan keputusan serta dampak yang ditimbulkan.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian keamanan manusia di India, di mana dalam tulisan ini akan berkaitan dengan pola kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah India khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pekerja anak dari proses kebijakan hingga di jalankannya kebijakan sejak tahun 2010-2018. Penelitian ini juga mencakup pembahasan terkait pekerja anak India, Pemerintah

India, faktor yang mempengaruhi, sebab akibat serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di India maupun hukum internasional.



1.6 Tinjauan Pustaka

Sunil Kumar Jangir mengatakan penyebaran pekerja anak merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi dunia pada umumnya, dan khususnya bagi negara-negara berkembang seperti India. Dalam kasusnya, pekerja anak dikerahkan oleh orang tua akibat dari faktor keuangan keluarga. Faktor lainnya adalah banyaknya tingkat pengangguran bagi orang dewasa dan terus meningkatnya populasi. Permasalahan sosial ekonomi, kemiskinan, pengangguran, demografis dan sikap apatisme dari pemerintah India merupakan faktor-faktor paling utama terjadinya kasus pekerja anak dalam skala yang besar. Di luar faktor tersebut, kebiasaan, sikap tradisional, kurangnya pendidikan, urbanisasi, industrialisasi dan migrasi juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya pekerja anak (Jangir, 2013, hal. 167).

Undang-Undang tentang perburuhan dikatakan tidak mampu memproteksi terjadinya pekerja anak yang berada pada bidang pertanian dan industri skala kecil. Program yang disediakan oleh negara bagian tidak memadai diberbagai negara bagian dan gagal memeriksa adanya pekerja anak. Sebagian besar dari anak-anak tidak mendengar program atau kebijakan yang ditujukan untuk mereka. Keterbatasan dari pemerintah pusat maupun negara bagian dan anak-anak yang tidak mendapatkan akses informasi mengenai kebijakan membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan terhadap terjadinya pekerja anak dan program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan efektif (Jangir, 2013, hal. 168). Dalam jurnal ini juga disebutkan dan dijabarkan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India untuk mengurangi pekerja anak dari berbagai departemen maupun kerja sama.

O.P Maurya dalam tulisannya banyak membahas mengenai tenaga kerja anak di India. Maurya fokus pada ketentuan hukum yang berlaku di India mengenai permasalahan tenaga kerja anak serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pekerja anak di India. Beberapa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pekerja anak di India berupa rehabilitasi dan pendidikan. Pendidikan dan rehabilitasi menjadi poin penting untuk dilakukan sebagai proses dalam pengurangan dan upaya menghapus pekerja anak di India. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi anak-anak di India (Maurya, 2017).

Penjelasan yang rinci mengenai ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah India dalam permasalahan pekerja anak serta argumen yang berdasarkan data menjadi kelebihan dalam jurnal ini. Kelebihan lainnya adalah O.P Maurya dalam tulisannya lebih banyak menggunakan sudut pandang pemerintah, menyampaikan apa saja yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi dan menghapus pekerja anak di India tanpa memperhatikan sudut pandang dari masyarakat India yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan sulitnya orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudut pandang yang berbeda menjadikan tulisan O.P Maurya sedikit berbeda dengan jurnal sebelumnya.

Nanjunda DC dan Steven Wind secara garis besar memiliki isi pembahasan yang sama dengan jurnal sebelumnya milik Maurya. Dalam tulisannya, Nanjunda dan Steve memberikan lebih banyak pandangan terkait kasus pekerja anak yang terjadi di India, seperti mengenai kebijakan pemerintah dalam mengurangi pekerja anak, perbandingan keadaan pendidikan di India dengan negara berkembang lainnya dan juga membahas mengenai penyebab

adanya pekerja anak yang salah satunya disebabkan oleh adanya perusahaan multinasional yang kuat beroperasi dan menggunakan pekerja anak secara langsung atau tidak langsung untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya (Nanjunda DC, 2017).

Tulisan tersebut juga memiliki perspektif yang luas sehingga tidak memprioritaskan pada salah satu pihak. Pemerintah sudah mengupayakan beberapa hal untuk menghapuskan pekerja anak di India seperti memasukkan kembali anak-anak tersebut ke pendidikan formal, namun hal tersebut tidak dapat berjalan efektif karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat serta kurangnya fasilitas yang memadai.

Dalam tulisan lain yang dikemukakan oleh Lee Tucker, kemiskinan hanya salah satu faktor penyebab dari terus terjadinya pekerja anak di India. Faktor lain yang mempengaruhi beberapa diantaranya tradisi perbudakan dari zaman dahulu, kurangnya pinjaman skala kecil untuk pedesaan dan kota miskin, kurangnya skema kesejahteraan sosial, kurangnya baiknya sistem pendidikan yang tidak wajib dan tidak memadai, kurangnya kesempatan kerja untuk orang dewasa, sedikitnya peluang untuk perubahan karir, korupsi dan ketidakpedulian pemerintah dan apatisnya masyarakat. Masalah lain adalah pekerja anak banyak yang sudah terikat dalam pekerjaan sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengeluarkan anak-anak dari pekerjaannya karena dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak berjalan dengan semestinya.

Sistem kerja yang terikat dan terus berkembang dengan jutaan anak-anak yang terlibat di dalamnya, pemerintah India harus memberantas hal ini setidaknya dengan dua cara. Pertama, menegakkan Undang-Undang Perburuhan dan

menciptakan alternatif bagi pekerja anak yang sudah terikat. Kedua, selain upaya dari pemerintah, penting bagi organisasi-organisasi maupun lembaga-lembaga nonpemerintah untuk mendorong upaya dari pemerintah dan di elaborasikan bersama-sama. Pemerintah memiliki wewenang dalam menerapkan hukum sementara organisasi maupun lembaga memiliki kepercayaan untuk memfasilitasi implementasi dari upaya pemerintah (Tucker, 1997).

Lee Tucker dalam tulisannya banyak mengemukakan dasar hukum domestik India serta implementasinya oleh pemerintahan. Pembahasan tentang pekerja anak, jenis pekerjaan, sumber hukum, sejarah hukum dan pekerja anak serta alternatif upaya yang sebaiknya dilakukan membuat jurnal ini sangat membantu dalam penelitian ini.

Mario Biggeri, Santosh Mehrotra dan Ratna M. Sudarshan dalam tulisannya menjelaskan tentang pekerja anak yang terlibat dalam pekerja rumah atau usaha keluarga yang terjadi di India. Dalam penelitiannya, ada beberapa indikator bagi orang tua melibatkan anak-anak dalam pekerjaan keluarga seperti beberapa diantaranya membantu perekonomian keluarga, membantu pekerjaan orang tua dan keamanan bagi anak itu sendiri. Pekerja anak yang bekerja dirumah membantu akan meminimalkan biaya pengeluaran keluarga daripada mengirim anak mereka bekerja keluar dari rumah dan juga anak-anak dapat melakukan dua aktifitas sekaligus yaitu bersekolah dan bekerja dirumah. Menjadi permasalahan ketika anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah ini adalah anak yang kebanyakan berusia 11 hingga 14 tahun yang dimana usia tersebut dalam peraturan ILO bukanlah usia minimal pekerja dan dalam peraturan perundang-

undangan India sendiri yang mengatakan bahwa anak-anak diperbolehkan bekerja ketika berusia diatas 14 tahun.

Pekerja anak dirumah ini menjadi permasalahan yang baru lagi ketika anak-anak harus terus bekerja membantu orang tuanya. Sebanyak 58 persen rumah tangga merasa bahwa standar hidup mereka akan menurun 8 persen dan rumah tangga tidak dapat bertahan hidup tanpa kontribusi anak terhadap pendapatan rumah tangga (Mario Biggeri, 2009).

Kelebihan lain dari jurnal milik Biggeri adalah dengan data sampel dari survey yang dilakukan pada keluarga-keluarga yang melakukan praktik pekerja anak rumahan dan pengaruhnya terhadap pendapatan keluarga. Jurnal ini juga memperhatikan aspek lainnya seperti pengaruh pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan akan mempengaruhi anak-anak dan dampak-dampak lainnya yang akan didapatkan oleh anak-anak di India serta memberikan rekomendasi yang seharusnya dilakukan untuk kebaikan anak-anak.

2. Landasan Teori/Konsep/Pendekatan

Teori Pengambilan Keputusan

Kebijakan adalah salah satu aspek politik yang memiliki dampak paling luas pada masyarakat. Garis besarnya, kebijakan adalah hasil (*output*) dari proses politik. Kebijakan mencerminkan pengaruh pemerintah kepada masyarakat yaitu kemampuan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan maupun keburukan. Analisis kebijakan mengkaji tentang bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan dibuat, sehingga dengan demikian proses kebijakan adalah serangkaian keputusan atau kumpulan keputusan yang saling terkait (Heywood, 2014, hal. 621).

Graham T Allison mengatakan ada tiga model yang dapat digunakan yaitu *The Rational Actor Model* yang menjelaskan pengambilan keputusan berdasarkan perilaku dengan mempertimbangkan *cost-benefit* yang didapatkan. *Organizational process* pengambilan keputusan yang berdasarkan birokrasi, program dan standar prosedur. *Bureaucratic Politics Model* menjelaskan pengambilan keputusan dari permainan tawar-menawar dari setiap pemangku kepentingan.

Model Aktor Rasional

Model aktor rasional melakukan pilihan terhadap kebijakan luar negeri sebagai produk ideal. Pengambil keputusan yang rasional mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan menentukan arah untuk mengambil pilihan yang paling prioritas diantara yang lain, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai opsi yang ada. Aktor rasional dalam pengambilan keputusan mampu memperkirakan hasil dan manfaat yang diharapkan. Pembuat kebijakan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap opsi dan membandingkan keuntungan yang paling banyak dengan biaya yang sedikit. Aktor rasional juga mempertimbangkan akibat atau konsekuensi yang dibuat hingga didapatkannya opsi terbaik. Aktor rasional akhirnya menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya perlu dipikirkan kembali *cost-benefit* yang akan didapatkan sebelum keputusan akhir dibuat.

Memilih secara rasional adalah memilih alternatif dari pilihan-pilihan yang paling efisien yang dapat memaksimalkan *benefit* dan meminimalkan *cost* yang dikeluarkan. Konsep dasar dari model tindakan rasional untuk merumuskan alternatif pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. *Goals and objectives*, aktor rasional harus membuat peringkat berdasarkan preferensi masing-masing dan konsekuensi yang kemungkinan akan ditimbulkan dari keputusan yang dibuat.
2. *Alternatives*, aktor rasional diharuskan memilih di antara pilihan alternatif dengan melakukan spesifikasi yang tepat untuk membedakan satu alternatif dengan yang alternatif lainnya.
3. *Consequences*, setiap alternatif akan dihadapkan dengan masing-masing konsekuensinya sesuai dengan alternatif yang dipilih, diperlukan keakuratan sebagai pengambil keputusan tentang konsekuensi yang akan ditimbulkan dari masing-masing alternatif.
4. *Choice*, pilihan rasional hanya terdiri dari pemilihan alternatif yang konsekuensinya menempati peringkat tertinggi menurut pengambil keputusan (Allison G. T., 1971, hal. 29-30).

Konsep dasar dari tindakan rasional ini digunakan untuk menopang aktor dalam pengambilan setiap keputusan agar didapatkan hasil yang berpengaruh besar dalam segala aspek bernegara. Rasionalitas mengacu pada pilihan yang memaksimalkan keuntungan yang konsisten dalam kendala-kendala yang ada.

Penelitian ini akan menggunakan model aktor rasional untuk menganalisis sebab alasan pemerintah India mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan anak dibawah umur 14 tahun untuk diperbolehkan bekerja pada sektor informal. Berdasar dengan konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah India sebagai wujud mendukung penghapusan pekerja anak di dunia, India harusnya dapat mengimplementasikan tujuan dari konvensi ILO 138 dalam bentuk peraturan nasional yang dirumuskan dalam peraturan nasional.

Table 1. Perkiraan Cost and Benefit Kebijakan Pekerja Anak di India.

Goals and Objectives	Alternatives	Consequences		Choice
		Costs	Benefits	
Mengurangi pekerja anak sesuai dengan konvensi ILO 138 dan mengurangi kemiskinan pada keluarga di India	Mengeluarkan kebijakan mengizinkan anak dibawah umur 14 tahun untuk bekerja pada sektor informal	<ul style="list-style-type: none"> - Berlawanan dari tujuan dibentuknya konvensi ILO 138 tentang usia minimal kerja dan keluar dari tujuan konvensi ILO untuk menghapus pekerja anak - Ancaman terhadap banyaknya anak yang akan berhenti bersekolah akibat bekerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah pendapatan keuangan keluarga dengan kemungkinan keluarga miskin akan berkurang - Pekerjaan keluarga akan terbantu dengan terlibatnya anak-anak pada sektor informal 	Preferensi Pertama
	Melarang anak dibawah umur 14 tahun untuk bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkokohkan kemiskinan pada keluarga dengan pendapatan yang hanya bersumber dari orang tua - Tingkat pengangguran akan bertambah dengan lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi bagi orang dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat memaksimalkan anak-anak untuk berfokus pada pendidikan dan bersekolah - Mengurangi jumlah pekerja anak yang terdapat di India - Mendukung upaya ILO mengurangi pekerja anak dan ikut menjalankan tujuan konvensi ILO 138 	Preferensi Kedua
	Membuat pengembangan dan pelatihan kejuruan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja anak masih tetap terjadi dan menjadi kesempatan bagi anak-anak dan keluarga miskin untuk tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak memiliki keterampilan khusus untuk siap menghadapi dunia kerja walaupun tidak memperoleh 	Preferensi Ketiga

		<p>menyekolahkan anak-anak mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja anak meskipun memiliki keterampilan khusus namun tidak menjamin keselamatan dan kesehatan anak-anak dalam bekerja dari eksploitasi. 	<p>pendidikan formal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka disekolah formal dan tetap dapat membantu orang tua mencari pendapatan keluarga 	
	Menyelenggarakan pendidikan gratis untuk anak-anak mendapatkan pendidikan formal	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah akan menggunakan banyak pengeluaran negara untuk anggaran pendidikan - Pendapatan keluarga miskin akan berkurang dengan tidak adanya anak yang bekerja membantu menambah perekonomian keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak akan fokus bersekolah dengan adanya pendidikan gratis yang diadakan pemerintah - Dengan bersekolah anak-anak lebih terjamin keselamatan fisik dan mental - Keluarga miskin akan terbantu untuk mengirim anak-anak ke sekolah dan mengurangi pengeluaran keluarga untuk pendidikan anak. 	Preferensi Keempat

Berdasarkan model aktor rasional yang dikemukakan Graham T. Allison, *Goals dan objectives* yang didapatkan pada tabel diatas merupakan hasil analisa yang diduga paling mendekati dengan tujuan dari pemerintah India. *Goals* menjadi tujuan umum dari sebuah kebijakan dan *objectives* berperan sebagai

tujuan khusus untuk mempercepat proses terwujudnya tujuan umum dalam hal ini mengurangi pekerja anak. Dalam kasus pekerja anak di India, kemiskinan menjadi faktor utama terjadinya pekerja anak di India, maka menurut peneliti *goals* yang seharusnya dicapai oleh pemerintah India adalah mengurangi pekerja anak dan *objectives* atau dengan kata lain cara untuk mencapai tujuan utama yang menjadi penyebab terjadinya pekerja anak yaitu mengurangi kemiskinan di India, maka didapatkanlah dugaan yang paling mendekati tersebut.

Goals dan objectives mengurangi pekerja anak di India sesuai dengan Konvensi ILO 138 dan mengurangi kemiskinan pada keluarga di India merupakan tujuan yang paling mendekati dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah India. Kemiskinan pada keluarga menjadi penyebab utama terjadinya pekerja anak di India, dengan anak yang diizinkan anak untuk bekerja pada sektor informal dalam hal ini keluarga besar pendapatan dan pekerjaan keluarga akan terbantu dan tercukupi, hal ini sesuai dengan keadaan pekonomi dan sosial yang terjadi di India yang angka kemiskinan pada keluarga cukup tinggi. Dengan pendapatan keluarga yang tercukupi harapannya akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang terdapat di India.

Pemerintah India juga berupaya mengurangi jumlah pekerja anak melalui tindakan yang sebelumnya belum dilakukan sebagai komitmen yang menunjukkan pemerintah India berupaya mengurangi jumlah pekerja anak dengan meratifikasi dua peraturan dari ILO yaitu Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum Pekerja dan Konvensi ILO 182 tentang Bentuk Terburuk dari Pekerja Anak setelah dikeluarkannya kebijakan mengizinkan pekerja anak pada sektor informal pada 2016 dan diikuti meratifikasi dua konvensi ILO pada tahun berikutnya 2017

(International Labour Organization, 2017). Selain itu, upaya lainnya yang juga memperlihatkan pemerintah India berupaya untuk mengurangi pekerja anak adalah peraturan perundang-undangan pekerja anak India (*Prohibition & Regulation) Act* tahun 2016 yang lebih banyak batasan dalam bentuk pekerjaan dan upaya dari Kementerian Tenaga Kerja (MOLE) pemerintah India yang melalui National Child Labour Project (NCLP) Scheme yang mengidentifikasi pekerja anak dan menarik anak-anak dari pekerjaan berbahaya dan memberikan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Program lainnya untuk mendukung program NCLP, pemerintah meluncurkan *Platform for Effective Enforcement of No Child Labour* (PENCIL) pada tahun 2017 yaitu sebuah portal online yang memungkinkan pemerintah, LSM dan penegak hukum untuk berbagi informasi dan berkoordinasi tentang kasus pekerja anak di negara bagian maupun tingkat nasional (Bureau of International Labour Affairs, 2017).

Alternatives pada umumnya dibuat untuk mencapai tujuan utama, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pilihan dengan melihat kondisi, situasi yang dialami oleh suatu negara. Alternatif pilihan yang tersedia memiliki spesifikasi tindakan yang membedakan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Menurut peneliti, dalam kasus pekerja anak yang terjadi di India, ada berbagai alternatif kebijakan yang dapat dan telah dilakukan oleh pemerintah India yang tujuannya sama yaitu mengurangi jumlah pekerja anak di India seperti mengizinkan anak bekerja hanya pada sektor informal, melarang sepenuhnya praktik pekerja anak, meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui pengembangan dan pelatihan kejuruan serta pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak di India. Maka, diperlukannya

analisa *cost* dan *benefit* untuk nantinya hingga mendapatkan preferensi atau dengan kata lain kecenderungan atau prioritas kebijakan yang paling memungkinkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di India.

Dalam konsep aktor rasional, aktor yang dalam hal ini pemerintah India harus bertindak secara rasional yang bertujuan dengan melakukan berbagai upaya untuk memilih strategi yang paling cocok untuk mencapai tujuan. Pemerintah India akan mempertimbangkan sebab akibat serta kerugian dan keuntungan yang didapat dari setiap alternatif yang ada. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India yang mengizinkan anak untuk bekerja tentu dibuat dengan pertimbangan dan berbagai alternatif yang kemudian menghasilkan keputusan tersebut.

3. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan beberapa data dan indikator untuk memenuhi tujuan penelitian. Metode kualitatif dianggap tepat untuk digunakan dalam pengembangan penelitian dan analisis fenomena sosial politik. Penelitian ini berisi analisis deskriptif yang meyakinkan yang didukung oleh data dan bukti yang disusun secara berurutan agar disampaikan dengan baik ke pembaca. Fakta dan bukti sangat penting dalam menilai masalah dan mencari hasilnya, kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen atau literatur.

Sumber dari penelitian ini menggunakan studi literature yang menggunakan data sekunder yang artinya peneliti menggunakan data yang sudah tersedia seperti halnya jurnal dari penelitian sebelumnya, laporan dari pemerintah maupun pihak yang memiliki keterkaitan seperti *website* resmi

maupun artikel yang berhubungan dan berkaitan sebagai rujukan dalam proses penulisan penelitian ini. Dengan keterbatasan yang dimiliki, terdapat kemungkinan akan adanya argumen dan data yang disampaikan dalam penelitian ini yang tidak sesuai atau tidak mendekati realitas sesungguhnya yang terjadi. Namun, peneliti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan data, informasi dan analisa dari sumber dan dasar pemikiran yang dapat diterima dan sesuai dengan konteks yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

Penulis akan mengatur beberapa asumsi atau argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan kemudian merefleksikannya ke data dan bukti yang ditemukan. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan analisa data. Analisa data yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengambilan data yaitu melalui studi literatur atau studi dokumen yang nantinya akan diorganisir dengan menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan hipotesis, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari sesuai dengan apa yang penulis akan cari dalam menjawab dan menjelaskan kasus tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi indikator-indikator bagi pemerintah India dalam merumuskan kebijakan-kebijakan atau putusan-putusan yang berkaitan dengan pekerja anak baik mengurangi maupun menambah terjadinya kasus pekerja anak. Pada bab 2 akan dibagi menjadi 4 sub bab yang membahas tentang landasan hukum pekerja anak baik dari domestik India maupun hukum internasional dan arah

kebijakan pemerintah India, alternatif kebijakan dan program yang tepat, serta uraian tentang kebijakan di sesuaikan dengan model yang digunakan oleh pemerintah India dalam membuat kebijakan. Pada bab 3 akan dibagi menjadi 4 sub bab yang berisi pembahasan tentang analisis faktor positif dan negatif dari ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah India, disahkan Undang-Undang tahun 2016 yang berkaitan dengan pekerja anak, dampak pada pekerja anak atas Undang-Undang, serta upaya dari pemerintah India mengurangi pekerja anak.



BAB II

ALTERNATIF KEBIJAKAN TERHADAP PEKERJA ANAK

Kasus pekerja anak di India merupakan hal yang telah terjadi sejak lama dan terus terjadi hingga saat ini dan belum mampu diselesaikan oleh pemerintah India. Pekerja anak di India menjadi hal yang kompleks karena saling berkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya seperti salah satunya aspek perekonomian yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap pembangunan dan sosial di India.

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang upaya yang dapat atau telah dilakukan oleh pemerintah India untuk mengurangi pekerja anak. Upaya mencapai tujuan dari pemerintah India diperlukannya *goals* dan *objectives* sebagai tujuan akhir dari segala upaya yang akan atau telah dijalankan oleh pemerintah India selama ini.

Program-program dan segala jenis upaya yang dilakukan oleh pemerintah India dalam berbagai aspek pemerintahan telah di laksanakan dengan sedemikian rupa, efektivitas dan keterbatasan dalam menjalankan program perlu untuk di analisis sebagai upaya lainnya untuk mencapai *goals* dan *objectives* yang telah ditetapkan. Pemerintah India memerlukan *altenatives* kebijakan untuk mampu merumuskan program yang tepat untuk mampu menyelesaikan dan mengurangi kasus pekerja anak di India. Empat *alternative* kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah India yang telah di rumuskan pada bab sebelumnya sekiranya cukup tepat untuk di analisis efektifitas dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Empat *alternatives* kebijakan tersebut diantaranya:

1. Kebijakan mengizinkan anak dibawah 14 tahun untuk bekerja di sektor informal;
2. Kebijakan larangan anak dibawah umur 14 tahun untuk bekerja;
3. Kebijakan pengembangan dan pelatihan kejuruan;
4. Kebijakan pendidikan gratis untuk anak-anak mendapatkan pendidikan formal.

Kepercayaan dan tradisi turun temurun yang hingga saat ini masih dipercayai oleh keluarga miskin di India beranggapan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting untuk anak-anak dibandingkan dengan bekerja yang menghasilkan pendapatan keuangan secara langsung untuk keluarga. Ditambah dengan kualitas pendidikan dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan cukup besar membuat keluarga miskin berpikiran untuk tidak mengirimkan anak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

2.1. Kebijakan Mengizinkan Anak Dibawah 14 Tahun Untuk Bekerja di Sektor Informal

International Labour Organization (ILO) mengatakan tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di klasifikasikan sebagai pekerja anak yang menjadi terget harus dihapuskan. Partisipasi anak-anak atau remaja dalam pekerjaan pekerjaan yang tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi mereka atau mengganggu sekolah mereka umumnya dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kegiatan seperti membantu orang tua dirumah, membantu dalam bisnis keluarga atau mendapatkan uang saku diluar jam sekolah dan selama liburan sekolah. Jenis kegiatan ini berkontribusi pada perkembangan anak-anak

dan kesejahteraan keluarga mereka. Kegiatan ini juga memberikan mereka keterampilan dan pengalaman dan membantu mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif selama masa dewasa.

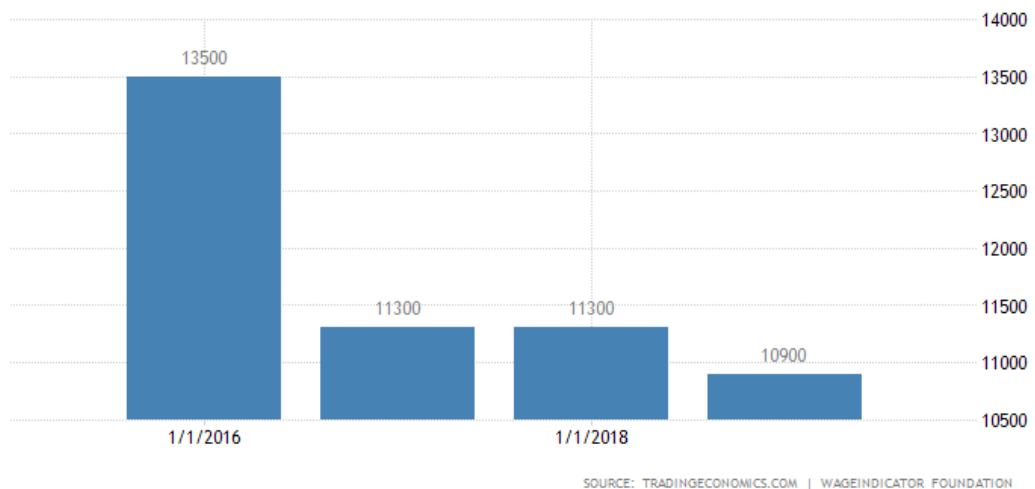
Istilah ‘pekerja anak’ sering di definisikan sebagai pekerjaan yang merampas anak-anak dari masa kecil mereka, potensi dan martabat mereka, dan itu berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental. Ini merujuk pada pekerjaan yang terlibat pada (1) Mental, fisik, sosial atau moral berbahaya dan berbahaya bagi anak-anak. (2) Mengganggu sekolah mereka dari kesempatan untuk bersekolah, mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya atau mengharuskan mereka untuk mencoba menggabungkan sekolah dengan pekerjaan yang terlalu panjang dan berat (International Labour Organization, 2004).

Pemerintah India sendiri telah mengeluarkan kebijakan mengizinkan anak dibawah umur 14 tahun bekerja pada bisnis keluarga dalam hal ini sektor informal dan beberapa larangan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah India ini setelah melihat keadaan sosial dan perekonomian di India sendiri. Anak-anak dibawah 14 tahun diizinkan bekerja untuk membantu keluarga atau usaha keluarga dalam pekerjaan yang tidak berbahaya dengan waktu diluar dari jam sekolah dan saat libur sekolah. Dasar pemikiran perlemen India mengizinkan anak dibawah usia 14 tahun bekerja disamping faktor sosial dan ekonomi negara, anak-anak membantu orang tua dalam pekerjaan seperti pertanian dan mengajarkan anak dasar-dasar pekerjaan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pendidikan dan kenyataan dari kondisi sosial ekonomi di negaranya.

Tetap mengizinkan anak dibawah usia 14 tahun untuk tetap bekerja tentunya memiliki konsekuensi tersendiri bagi anak-anak, selain bagi anak-anak itu sendiri, mengizinkan pekerja anak juga menambah permasalahan baru untuk perekonomian suatu negara seperti salah satunya bertambahnya pengangguran bagi orang dewasa dan nilai upah buruh. Pekerja anak berdampak pada perkembangan anak, kesehatan fisik dan mental anak meskipun tidak semua pekerjaan berbahaya bagi anak. Dampak pekerja anak memiliki nilai konsekuensi jangka panjang pada orang dewasa. Dampak dari pekerja anak pada pasar tenaga kerja lokal suatu negara, hal ini lebih buruk dibandingkan dengan dampak terhadap perkembangan anak (Edmonds, 2016, p. 3).

Ketika ada lebih banyak pekerja dibandingkan dengan upah yang akan diberikan, pekerja akan bersaing menurunkan upah. Semakin banyak pekerja anak dalam perekonomian maka akan semakin rendah upah pekerjaan yang didapatkan oleh anak-anak (pekerja tidak terampil). Hal ini akan menciptakan siklus kemiskinan, pekerja anak menyebabkan upah menjadi rendah yang kemudian menyebabkan butuhnya pekerja anak. Upah pekerja tidak terampil yang rendah memiliki konsekuensi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya tenaga kerja tidak terampil menghambat adopsi teknologi intensif keterampilan. Semakin banyak pekerja anak, semakin banyak tenaga kerja tidak terampil. Ini membuat buruknya sumber daya manusia dan membuat perekonomian negara-negara menjadi lebih buruk dalam jangka panjang (Edmonds, 2016, p. 4).

Gambar 1.
Nilai Upah Tenaga Kerja Tidak Terampil di India.



Dari tabel nilai upah tenaga kerja tidak terampil diatas, nilai upah yang didapatkan oleh buruh setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga 2019 terus menurun hingga tahun 2019 dan menjadi upah terendah saat ini di India. Upah ini sangat berbanding terbalik dengan tenaga kerja terampil yang nilai upahnya tiga kali lipat dari upah tenaga kerja tidak terampil.

2.2.Kebijakan Larangan Anak dibawah Umur 14 Tahun Bekerja.

Setiap anak didunia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik dari aspek kehidupan terkecil seperti keluarga maupun aspek yang lebih besar seperti negara. Negara berhak menjamin kehidupan yang layak bagi anak-anak di negaranya, menjamin setiap anak mendapatkan hak atas usianya dan melakukan berbagai aktifitas sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. India sebagai salah satu negara yang memiliki banyak pekerja anak di negaranya memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Namun, komitmen dalam upaya mengurangi pekerja anak terus berubah tergantung pada berubahnya pemimpin kekuasaan.

Hukum perundang-undangan India yang mengatur dan melarang tentang pekerja anak telah dimasukkan dalam perundang-undangan *Prohibition and regulation Act* tahun 1986 dan *Juvenile Justice Act*. Kedua sumber hukum dan perundang-undangan ini sebagai penguat upaya mengurangi pekerja anak yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2015 dan disahkan oleh parlemen India pada 2016 yang isinya anak-anak di India tetap diizinkan untuk bekerja pada sektor informal.

Organisasi buruh internasional (ILO) juga memiliki peraturan perundang-undangan internasional yang mengatur tentang permasalahan pekerja anak yang telah diratifikasi hampir seluruh negara didunia sebagai upaya untuk menghapus pekerja anak didunia, dan India merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi peraturan perundang-undangan ini. Isi dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh ILO sebagai berikut :

1. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengatur Tentang Usia Minimum Diperbolehkan Untuk Bekerja. Secara garis besar tujuan dari Konvensi ILO 138 ini sebagai upaya penghapusan pekerja anak dari pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak, pekerjaan yang mengganggu pendidikan wajib atau bekerja diusia yang telalu muda. Konvensi ILO 138 mengharuskan negara-negara ratifikasi untuk:

1. Menetapkan usia minimum untuk bekerja atau masuk dalam pekerjaan.
2. Menetapkan kebijakan nasional untuk penghapusan pekerja anak.

Konvensi ILO 138 diikuti dengan Rekomendasi Nomor 146 yang menekankan bahwa kebijakan dan rencana nasional suatu negara harus menyediakan :

1. Pengentasan kemiskinan dan promosi pekerjaan yang layak untuk orang dewasa sehingga orang tua tidak menggunakan anak mereka untuk bekerja.
2. Pendidikan gratis dan wajib serta penyediaan pelatihan kejuruan.
3. Perluasan jaminan sosial dan sistem pendaftaran untuk kelahiran.
4. Fasilitas yang sesuai untuk perlindungan anak-anak dan remaja yang bekerja.

Untuk keefektifan upaya mengurangi pekerja anak, perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja anak ini harus dimasukkan dalam respons kebijakan komprehensif tersebut.

Konvensi 138 memungkinkan negara untuk mengizinkan pekerjaan ringan untuk anak-anak dibawah usia minimum. Anak-anak dapat terlibat dalam pekerjaan ringan yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang tidak mengganggu sekolah. Negara yang mengizinkan anak-anak untuk melakukan pekerjaan ringan harus menentukan kegiatan yang dianggap pekerjaan ringan pada jam dan keadaan yang dapat anak-anak lakukan. Hampir setengah dari negara-negara yang meratifikasi Konvensi 138 telah memilih untuk melegalkan pekerjaan ringan untuk tahap pembangunan ekonomi dan sosial (International Labour Organization, 2018).

2. Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999

Konvensi ILO Nomor 182 mengatur tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Dari Pekerja Anak. Konvensi 182 ini memperkuat dari konvensi tentang pekerja anak yang sebelumnya, lebih memfokuskan perhatian internasional kepada upaya untuk menghapus bentuk terburuk dari pekerja anak sebagai prioritas.

Konvensi 182 hampir sama dengan Konvensi 138 yaitu terdapat rekomendasi-rekomendasi sebagai contoh bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak. Rekomendasi-rekomendasi Nomor 190 yang menyertai Konvensi 182 beberapa diantaranya yang mencakup (International Labour Organization, 2018) :

1. Pekerjaan yang membuat anak-anak terkena pelecehan fisik, psikologis atau seksual.
2. Bekerja dibawah tanah, dibawah air, di ketinggian berbahaya atau diruang terbatas.
3. Bekerja dengan mesin, peralatan berbahaya atau membawa beban berat.
4. Paparan bahan berbahaya, suhu, tingkat kebisingan atau getaran yang merusak kesehatan.
5. Bekerja berjam-jam, bekerja malam hari atau kurungan dalam rumah majikan tempat bekerja.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh ILO dan telah di ratifikasi oleh India, kemudian hukum domestik India *Prohibition and Regulation Act* serta *Juvenile Justice Act* seharusnya sudah cukup kuat sebagai landasan India

untuk menjalankan kebijakan mengurangi pekerja anak dengan melarang seluruh aktifitas pekerja anak.

Kebijakan pelarangan seluruh aktivitas dan segala bentuk pekerja anak tidak semudah yang dapat dibayangkan, hal ini akan melibatkan banyak pihak terutama pemerintah yang harus konsisten dengan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan sanksi serta bentuk tindakan untuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan berikutnya. Upaya menghapus pekerja anak pada negara berkembang seperti India akan mengalami perubahan besar bagi masyarakatnya. Peraturan yang bersifat memaksa, mempromosikan pendidikan dan jaring pengaman sosial dapat menjadi upaya bagi pemerintah untuk mengurangi pekerja anak.

Melarang segala bentuk pekerja anak juga memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi perekonomian, terutama perekonomian keluarga miskin dan dampak-dampak lainnya. Berpikiran bahwa larangan sepenuhnya pada pekerja anak akan menjadi awal yang baik untuk memperbaiki tenaga kerja di negara-negara berpenghasilan rendah atau memperbaiki kondisi pekerja anak dengan mengabaikan efek dari larangan itu sendiri. Keluarga dengan pendapatan yang tidak konsisten tidak dapat mengadakan jaring pengaman sosial dari pemerintah, larangan langsung semacam ini dapat menghancurkan keluarga miskin. Larangan seperti ini akan membuat anak-anak tetap di pekerjaan secara tidak terlihat seperti salah satu contohnya adalah pelacuran.

Dampak negatif lainnya dari pelarangan pekerja anak adalah menurunnya tingkat pendapatan keluarga. Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi

dibeberapa tempat merupakan budaya yang tidak dapat terhindarkan. Banyak masyarakat berpendapat bahwa anak-anak yang bekerja dapat diterima dalam beberapa konteks seperti bisnis keluarga (Wijen, 2015).

Penting bagi anak-anak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang mereka perlukan. Menurut ILO, ada manfaat ekonomi yang besar bagi negara-negara berkembang seperti India mengirim anak-anak untuk bersekolah dari pada bekerja. Anak-anak yang tidak memiliki pendidikan tidak akan memperoleh keterampilan yang diperlukan seperti kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan teknis lainnya yang akan meningkatkan produktivitas mereka untuk memungkinkan mereka mendapat pekerjaan yang lebih tinggi di masa depan dengan upah yang lebih tinggi dengan kemungkinan nanti akan mengangkat keluarga dari kemiskinan (Chattoraj, 2012).

Upaya yang dapat dilakukan apabila opsi kebijakan melarang seluruh aktifitas pekerja anak adalah mengembalikan anak-anak ke sekolah formal maupun sekolah kejuruan. Mengembalikan anak-anak ke sekolah akan memberikan waktu bagi anak-anak untuk belajar dan beraktifitas sebagaimana anak-anak semestinya. Pemerintah India harus membenahi kualitas pendidikan di India dan banyak memberikan insentif bagi anak-anak yang bersekolah seperti beasiswa maupun biaya pendidikan yang murah dan terjangkau agar anak-anak lebih tertarik untuk bersekolah dan tidak mengeluarkan biaya yang besar bagi keluarga sebagai bentuk mempertahankan anak-anak agar tidak kembali bekerja.

Belum ada dan belum pernah sebelumnya negara berkembang seperti India melakukan larangan terhadap pekerja anak baik disektor formal dan

informal. Akan sangat sulit menghilangkan pekerja anak secara keseluruhan dalam sebuah negara terutama pada sektor informal. Namun, sejak diterapkannya peraturan perundang-undangan (*prohibition & Regulation*) Act tahun 1986 perubahan banyak terjadi di India terutama dalam hal perekonomian masyarakat miskin.

2.3. Kebijakan Pengembangan dan Pelatihan Kejuruan

Pengembangan dan pelatihan kejuruan memiliki peranan cukup penting dan seharusnya dapat disamakan dengan pendidikan formal karena pendidikan kejuruan dapat membantu angkatan kerja masa depan untuk memperoleh keterampilan terhadap pekerjaan tertentu dan membuat pekerja lebih terampil. Pengembangan dan pelatihan kejuruan salah satu upaya untuk mengembangkan keterampilan individu dalam bidang tertentu untuk memberikan pengalaman tidak hanya untuk dipekerjakan tetapi juga membantu dalam menciptakan lapangan kerja.

Pengembangan dan pelatihan kejuruan memiliki nilai lebih dalam menyelesaikan permasalahan di India, selain sebagai upaya menghapus pekerja anak dan mendidik anak untuk memiliki keterampilan khusus menghadapi dunia kerja, pelatihan kejuruan juga dapat membantu permasalahan pengangguran yang juga banyak terjadi di India. Banyaknya pengangguran pada orang dewasa menyebabkan anak-anak turut terlibat untuk menambah pendapatan keluarga. Pengangguran secara garis besar banyak disebabkan oleh minimnya kemampuan dan keterampilan orang dewasa menghadapi dunia kerja. Dengan adanya pelatihan yang tidak hanya di tujukan kepada remaja atau anak-anak, orang

dewasa juga berkesempatan memiliki kemampuan khusus untuk dapat bekerja dan menambah perekonomian keluarga.

Kebijakan pengembangan keterampilan merupakan sebuah kebijakan yang telah diusulkan pada tahun 2009 dan 2015. Kebijakan yang diusulkan pada 2009 menyebutkan beberapa persoalan yang di hadapi India seperti pertumbuhan ekonomi, kapasitas tenaga kerja dan pembangunan keterampilan terhadap populasi menjadi faktor penting atas kebijakan ini. Pada pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi tahun 2014 kebijakan ini mulai dijalankan hingga sekarang.

Program dengan berbagai bentuk yang telah dijalankan oleh pemerintah India terkait dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan memiliki berbagai macam tujuan. Program-program ini dijalankan langsung oleh pemerintah India melalui kementerian keuangan, kementerian ketenagakerjaan, maupun kementerian pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Kementerian pengembangan keterampilan dan kewirausahaan merupakan kementerian yang berperan penting dalam menjalankan program pemerintah India yang berkaitan dengan tenaga kerja ahli atau kejuruan yang saat ini masih terus dijalankan oleh pemerintah India. Kementerian ini baru terbentuk pada tahun 2014 yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan di India serta menyiapkan pasokan tenaga kerja terampil untuk membangun keterampilan baru, pemikiran yang inovatif dan pekerjaan yang baik.

Dalam upaya menjalankan kebijakan pelatihan ataupun pendidikan kejuruan, pemerintah India telah mengenalkan sebuah istilah '*Skill India*' untuk

memperkenalkan program yang berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan kejuruan. *Skill India* Program yang dijalankan oleh kementerian pengembangan keterampilan dan kewirausahaan yang diluncurkan pada 15 Juli tahun 2015 adalah sebuah inisiatif dari pemerintahan India yang telah di luncurkan untuk memberdayakan kaum muda di India dengan serangkaian keterampilan yang dapat menjadikan kaum muda lebih dapat dipekerjakan dan lebih produktif di lingkungan kerja. India yang memiliki 65 persen kaum muda di kelompok usia kerja harus melalui pengembangan keterampilan pemuda sehingga kaum muda tidak hanya bertumbuh secara pribadi tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam upayanya, *Skill India* menawarkan kursus di 40 sektor di India dengan standar yang baik dan di akui oleh industri maupun pemerintah dibawah kerangka kualifikasi keterampilan nasional. Kursus membantu untuk seseorang untuk fokus pada penyampaian kerja praktis dan meningkatkan keahlian teknis. *Skill India* tidak hanya terbatas pada pasar kerja domestik tetapi secara aktif terlibat dengan negara-negara diseluruh dunia untuk mempromosikan peluang kerja di pasar internasional. Pemerintah menginginkan India memiliki tenaga kerja terampil mampu memenuhi tidak hanya permintaan pasar dalam negeri tetapi juga permintaan global.

National Skill Development Corporation (NSDC) adalah perusahaan terbatas publik yang didirikan pada 31 Juli 2008. NSDC didirikan oleh Kementerian Keuangan sebagai *Public Private Partnership* (PPP). Pemerintah India melalui Kementerian Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan

(MSDE) memegang 49% modal saham NSDC sementara sisanya di pegang oleh sektor swasta.

NSDC bertujuan untuk mempromosikan pengembangan keterampilan dengan mengkatalisasi penciptaan lembaga kejuruan yang besar, berkualitas dan menguntungkan. NSDC menyediakan dana untuk membangun inisiatif pelatihan kejuruan yang dapat di skalakan dan menguntungkan. Memungkinkan sistem pendukung yang berfokus pada jaminan kualitas, sistem informasi, dan melatih akademi baik secara langsung ataupun kemitraan (National Skill Development Corporation).

NSDC merupakan organisasi dibawah kementerian MSDE merupakan perusahaan nirlaba dibawah *Companies Act 1956* dengan struktur tata kelola yang sesuai. Korporasi akan membentuk Dewan Keterampilan Sektor dengan fungsi-fungsi berikut (Maqbool & Khan, 2019):

1. Identifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan termasuk menyiapkan katalog jenis keterampilan, jangkauan dan kedalaman keterampilan untuk memfasilitasi individu untuk memilih dari mereka.
2. Menentukan keterampilan/standar kompetensi dan kualifikasi, standarisasi proses afiliasi dan akreditasi, ujian dan sertifikasi.
3. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan untuk pelatih.
4. Promosi akademi keunggulan
5. Pembentukan sistem informasi pasar kerja khusus sektor terstruktur dengan baik untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan pelatihan.

National Skill Development Corporation merupakan organisasi yang berdiri dibawah kementerian MSDE yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelatihan kejuruan di India. NSDC bekerja sama dengan banyak perusahaan pelatihan kejuruan baik dari pemerintahan sendiri maupun sektor swasta yang tersebar luas di berbagai negara bagian di India.

2.4.Kebijakan Pendidikan Gratis Untuk Anak-anak Mendapatkan Pendidikan Formal

Pekerja anak merupakan permasalahan yang serius di India untuk kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin, anak-anak yang bekerja tidak mendapatkan pendidikan yang mereka perlukan. Pekerja anak tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara fisik, intelektual, emosional dan psikologis. Anak-anak yang tidak bersekolah buta huruf dan membatasi kemampuan untuk berkontribusi untuk kesejahteraan mereka sendiri. Pekerja anak memiliki efek buruk jangka panjang bagi india, untuk menjaga perekonomian tetap sejahtera sangat penting untuk memiliki tenaga kerja terdidik yang dilengkapi dengan keterampilan yang relevan untuk kebutuhan industri (Chattoraj, 2012).

Dalam peraturan perundang-undangan di India telah diatur mengenai pendidikan gratis untuk sekolah formal di India. Pemerintah India juga menjamin hak bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan gratis. Undang-undang dasar (Amandemen Delapan Puluh Enam), 2002 Pasal 21-A dalam Konstitusi India memberikan pendidikan gratis dan wajib bagi semua anak dan kelompok usia enam hingga empat belas tahun sebagai Hak Fundamental. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan gratis dan wajib (RTE) Act, 2009 menggambarkan

bahwa anak memiliki hak untuk pendidikan dasar penuh waktu, kualitas yang baik dan merata disekolah formal yang memenuhi norma dan standar. Pendidikan Wajib mewajibkan pemerintah dan otoritas lokal yang berwenang untuk menyediakan dan memastikan penerimaan, kehadiran dan penyelesaian pendidikan oleh semua anak dalam kelompok usia 6-14 tahun (Department of School Education & Literacy).

Undang-Undang Hak Anak atas Pendidikan Gratis dan Wajib '*The right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act*' tahun 2009, mewakili undang-undang konseskuensial yang di sebutkan dalam 21-A, berarti bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dasar penuh waktu dengan kualitas yang memuaskan setara dengan sekolah formal yang memenuhi standar esensial tertentu. Pasal 21-A dan Undang-Undnag RTE mulai diberlakukan pada April 2010. Pendidikan gratis dan wajib diartikan sebagai tidak ada anak yang tidak di dukung oleh pemerintah yang berwenang dan berkewajiban membayar segala jenis biaya atau pengeluaran yang menghalangi anak menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan wajib memberikan kewajiban kepada pemerintah dan otoritas lokal untuk menyediakan, memastikan, penerimaan, kehadiran dan penyelesaian pendidikan dasar semua kelompok anak usia 6-14 tahun.

Perlindungan hukum dan hak anak untuk memperoleh pendidikan gratis dan wajib dari pemerintah India tertuang dalam perundang-undangan India. Jika peraturan perundang-undangan ini mampu dijalankan akan lebih mengurangi jumlah pekerja anak di India. Definisi pekerja anak yang menyamakan anak yang tidak bersekolah dengan pekerja anak berasal dari pendekatan berbasis hak ke

arah pembangunan yang menganggap tidak sekolah sebagai pengingkaran hak anak terhadap pendidikan (Lieten, 2003).

Mempertimbangkan kompleksitas dan besarnya masalah Kebijakan Nasional tentang Pekerja Anak di umumkan pada tahun 1987 yang menekankan diperlukannya langkah-langkah penegakan yang ketat di bidang-bidang yang berkonsentrasi pada pekerja anak. Untuk menerapkan skema diatas menjadi sebuah tindakan, pemerintah India memprakarsai Proyek Skema Pekerja Anak Nasional pada tahun 1988 untuk merehabilitasi anak-anak yang bekerja dimulai dengan 12 pekerja anak kabupaten endemis di India. Dibawah skema, anak-anak yang bekerja di identifikasi melalui survei pekerja anak, ditarik dari bekerja ke sekolah khusus, sehingga memberi mereka lingkungan yang memungkinkan untuk bergabung sistem pendidikan umum. Dalam hal ini sekolah khusus, selain pendidikan formal, mereka diberikan upah Rs. 100/bulan, nutrisi, pelatihan kejuruan dan pemeriksaan kesehatan rutin. Selain itu, upaya juga di buat untuk menargetkan keluarga-keluarga dari anak-anak ini sehingga dapat menutupi mereka dibawah perkembangan program generasi pemerintah (Chattoraj, 2012, pp. 47-49).

Skema yang dibangun oleh pemerintah India melalui NCLP bekerja sama dengan banyak pihak termasuk masyarakat dan LSM. Departemen lainnya dalam pemerintahan juga turut serta seperti Departemen Pendidikan, Pembangunan Pedesaan, Tenaga Kerja, Kesejahteraan Sosial, dan Pengembangan Anak dan Wanita ikut andil dalam skema ini. Mahkamah Agung India memberi petunjuk tentang cara dimana anak-anak yang bekerja dipekerjaan berbahaya ditarik dari pekerjaan dan di rehabilitasi.

Pekerja anak adalah hasil dari berbagai penyebab dan memiliki banyak dimensi, pemerintah India memberlakukan Undang-Undang (1986) dan menyiapkan kebijakan nasional tentang pekerja anak (1987) untuk mengatasi masalah tersebut dengan pendekatan multi cabang. Pilar penting kebijakan itu terdiri dari tiga langkah sebagai berikut (Lal & Khare, 2004) :

1. Rencana Tindakan Legislatif – Penegakan hukum yang ketat dan efektif terkait dengan pekerja anak dibawah berbagai undang-undang.
2. Konvergensi program pembangunan pemerintah – Fokus pada konvergensi berbagai inisiatif pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan akses ke jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial pekerja anak dan keluarga mereka.
3. Rencana aksi berbasis proyek – Implementasi skema Proyek Pekerja anak (NCLPS) dibidang konsentrasi pekerja anak yang tinggi.

Biaya pendidikan adalah masalah lain bagi keluarga miskin. Ini berkontribusi pada eksploitasi anak. Sekolah harus terjangkau dan dapat di akses. Sekolah yang terdapat dinegara berkembang dapat membantu meningkatkan partisipasi sekolah tetapi tidak dapat mengurangi insiden pekerja anak. Pendidikan yang berkualitas dapat menjauhkan anak-anak dari pekerjaan, penting bagi sekolah untuk memiliki rasio guru berpendidikan dikelas. Tetapi, bagi banyak orang tua miskin mahal untuk menyekolahkan anak-anak mereka, karena keluarga mereka hidup dari pendapatan anak-anak dan tidak mampu membayar biaya sekolah, seragam atau biaya tambahan lainnya. Ini adalah masalah di negara berkembang

untuk menyediakan pendidikan gratis yang berkualitas karena akan membebani pemerintah (Nagar, 2011)



BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PEKERJA ANAK

Kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan perlu untuk dipelajari dan dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui perkiraan hasil yang akan dicapai apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik dan buruk suatu kebijakan akan dapat terlihat setelah kebijakan dijalankan, untuk meminimalisir kebijakan akan berakibat buruk dan tidak sesuai dengan perkiraan diperlukannya analisis dan pertimbangan yang matang agar hasil akhir dari sebuah kebijakan telah dipersiapkan untuk memperbaiki atau mengantisipasi apabila kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan sebenarnya.

Kebijakan pekerja anak adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang kompleks. Program atau kebijakan dapat mengubah struktur produktif rumah tangga dan insentif yang dihadapi rumah tangga yang berbeda dalam berbagai cara, sering kali menyulitkan untuk memprediksi dampak keseluruhannya terhadap pekerja anak (Dammert & et.al, 2007).

Pemerintah India memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi kasus pekerja anak seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini, peneliti akan berfokus pada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada setiap kebijakan yang menjadi pilihan kebijakan (*alternative*) dengan perhitungan untung dan rugi (*cost and benefit*) hingga didapatkan kebijakan yang sekiranya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah India. Analisis akan membahas tiga sektor yang sekiranya berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara di India yaitu ekonomi, politik dan sosial.

3.1. Konsekuensi (*Cost & Benefit*) Pilihan Kebijakan Mengizinkan

Anak dibawah 14 Tahun untuk Bekerja di Sektor Informal

3.1.1. Ekonomi

India sebagai negara berkembang dengan populasi terbanyak di dunia sulit untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk menjamin kehidupan masyarakat akan lebih baik atau buruk nantinya, kondisi perekonomian masyarakat di India terutama perekonomian keluarga dengan pendapatan rendah sangat bergantung pada setiap anggota keluarga turut membantu untuk mendapatkan penghasilan. Kebijakan menghapus seluruh aktivitas pekerja anak akan memberikan dampak yang besar bagi keluarga miskin dengan pendapatan yang rendah di India.

Pada bab sebelumnya telah dibahas beberapa konsekuensi dari adanya pekerja anak secara umum seperti contohnya tingkat pengangguran yang semakin bertambah dan upah buruh yang terus menerus menjadi menurun akibat dari pasar tenaga kerja yang lebih memilih anak-anak menjadi pekerja dibandingkan orang dewasa karena upah kerja anak-anak yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Pengangguran yang terus bertambah dan upah yang rendah pada orang dewasa akan mempermanenkan kemiskinan keluarga di India karena anak-anak dalam suatu keluarga akan turut membantu mencari pendapatan untuk perekonomian keluarga.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh diizinkannya pekerja anak dapat dibagikan menjadi dua aspek dalam skala yang kecil yaitu perekonomian keluarga miskin dan untuk skala yang lebih besar perekonomian negara. Skala yang kecil seperti keluarga miskin memiliki dampak yang cukup besar bagi keluarga

tersebut. Keluarga pada umumnya akan mengandalkan kepala keluarga sebagai sumber penghasilan keluarga, berbanding dengan keluarga miskin di India yang sumber pendapatannya menjadi tugas bersama.

Dalam skala yang lebih besar yaitu pendapatan ekonomi sebuah negara, anak-anak terlibat meningkatkan pendapatan negara melalui perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja dan menghasilkan produk yang kemudian diekspor keluar negeri untuk dijual. Semakin besar dan banyak produk yang dihasilkan oleh anak-anak maka semakin besar pula ekspor yang dilakukan oleh negara dan akan mendapat lebih banyak keuntungan ekonomi oleh negara. perusahaan-perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan lebih dengan biaya upah anak-anak yang rendah dengan hasil yang banyak.

Selain dampak negatif dari adanya pekerja anak, ada beberapa kelebihan dari mengizinkan anak-anak bekerja pada sektor informal, beberapa hal yang menjadi dampak positif bagi anak maupun hal lainnya seperti :

1. Meningkatkan penghasilan keluarga, anak-anak berkesempatan membantu perekonomian keluarga dari pendapatan yang kurang untuk biaya kehidupan sehari-hari dari orang tua, dengan anak ikut memiliki penghasilan bagi keluarga setidaknya mengurangi beban konsumsi sehari-hari.
2. Memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, anak-anak memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, mengurangi beban keluarga dengan memiliki penghasilan sendiri. Meskipun tanggung

jawab ini belum seharusnya diberikan namun banyak membantu untuk keluarga miskin melengkapi kebutuhan.

3. Mengurangi biaya produksi yang rendah, biaya produksi akan lebih murah dengan memberikan upah yang lebih sedikit kepada pekerja anak-anak dibandingkan pekerja dewasa. meskipun ini menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan dan industri.
4. Memiliki fleksibilitas waktu, anak-anak memiliki waktu bekerja dan jenis pekerjaan yang lebih fleksibel dibandingkan pekerja dewasa, anak-anak bekerja lebih rajin dan dapat memproduksi lebih banyak dari pekerja dewasa, hal ini sekali lagi dapat menguntungkan untuk produksi perusahaan dan negara dengan hasil kerja yang dapat di jual atau mungkin di ekspor untuk kemajuan perekonomian India (Kumar R. , 2008).

Pekerja anak yang hanya diizinkan hanya pada sektor informal merupakan salah satu pilihan yang memungkinkan bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan keadaan perekonomian keluarga maupun negara. Anak yang bekerja pada sektor informal sesuai dengan keadaan dan kondisi perekonomian di India dimana pengangguran pada orang dewasa masih banyak terjadi, orang tua dengan upah yang rendah ataupun sulit mendapatkan pekerjaan akan terbantu dengan anak yang ikut membantu mendapatkan penghasilan. Anak yang bekerja tentu bukan keinginan utama bagi keluarga miskin, melainkan keterpaksaan yang harus dilakukan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong lainnya yang membuat anak ikut bekerja pada sektor informal seperti sulitnya mencari pekerjaan pada orang dewasa. Jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan

pekerjaan yang tersedia tidak seimbang membuat pengangguran semakin banyak terjadi di India.

**Table 2. Hasil Ujian (Pendidikan Sekolah): *Open Board*
Kelas X (*primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary 2 tahun*) &
Class XII (*senior secondary*) tahun 2016**

<i>Class</i>	<i>Number of Students (In thousand)</i>					
	<i>Appeared</i>			<i>Passed</i>		
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
<i>Class X (All)</i>	374.4	242.7	617.2	148.8	106.5	255.3
<i>Class XII (All)</i>	254.2	178.9	433.1	109.6	86.5	196.1

Table 3. Hasil Ujian (Pendidikan Tinggi): 2015-2016

<i>Level</i>	<i>Number of Pass-out</i>		
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
Ph.D.	14887	9284	24171
M.Phil.	8701	14423	23124
Post Graduate	665846	739150	1404996
Under Graduate	3128466	3203533	6331999
PG Diploma	95013	80340	175353
Diploma	500999	287323	788322
Certificate	37321	41467	78788
Integrated	12477	10127	22604
Total	4463710	438547	8849357

Sumber : Education & Literacy, New Delhi (Ministry of Human Resource Development, 2018)

Table 4. National Career Services 2020
All job opportunities-One platform

<i>Active Job Seekers</i>	01,03,21,374
<i>Active Employers</i>	56,984
<i>Active Vacancies</i>	01,94,572

Sumber : (National Career Services, 2020)

Pada tahun 2018, laporan menunjukkan terdapat 8,1 juta pencari kerja aktif dibandingkan dengan 1.17.958 (0,1 juta) lapangan pekerjaan yang tersedia. Perbedaan yang besar antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan (Desk, 2018). Tingkat pengangguran di India meningkat menjadi 7,2% pada Februari 2019 di dibandingkan Februari 2018 yang hanya 5,9%. Berdasarkan angka tersebut, terdapat 14 juta pengangguran di India pada Juli 2017, meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 29 juta pada Oktober 2018. Pada Februari 2019, India memiliki sekitar 31,2 juta orang secara aktif mencari pekerjaan (Nadeem, 2019).

Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply*. Negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan sulit mengatur perekonomian, *demand* dan *supply* angkatan kerja adalah bagian dari pasar tenaga kerja. Kondisi dan perubahan secara signifikan suatu negara mempengaruhi keseimbangan angkatan kerja dan pasokan tenaga kerja (Chand, Tiwari, & Phuyal, 2017). Ketidakseimbangan yang mengakibatkan pengangguran ini akan menimbulkan dampak lainnya seperti salah satunya pekerja anak akibat dari orang dewasa yang tidak mendapatkan pekerjaan atau bekerja dengan penghasilan rendah. Maka dari itu, anak-anak yang membantu perekonomian keluarga dengan

bekerja pada sektor informal berbasis keluarga akan sangat membantu pendapatan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari.

3.1.2. Politik

Dalam hal politik India baik konteks dalam negeri maupun hubungan luar negeri akan berdampak pada setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah India. Pemerintah India memiliki berbagai program dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pekerja anak, namun hal ini belum terlalu berdampak besar terhadap pekerja anak. Peraturan perundang-undangan tentang pekerja anak di India (*Prohibition & Regulation*) Act yang terus berubah-ubah seiringan dengan bergantinya kursi kekuasaan di India sehingga komitmen untuk menghapus pekerja anak juga terus berubah.

Pekerja anak memiliki nilai tambah tersendiri dalam berbagai sektor seperti salah satunya pendapatan ekonomi. Pemerintah India tidak serta merta menghapus pekerja anak pada sektor informal tentu saja memiliki sebab alasan yang tepat seperti untuk mempertahankan stabilitas negara. Pekerja anak yang dilarang dalam sektor informal akan memberikan dampak bagi usaha milik keluarga maupun perusahaan-perusahaan non-pemerintah terutama perusahaan internasional yang beroperasi di India yang menggunakan tenaga kerja anak-anak.

Pekerja anak meskipun hanya dilarang dalam sektor formal, praktik pekerja anak pada sektor formal masih tetap terjadi karena sulitnya untuk mendapatkan akses informasi maupun menjangkau secara langsung anak-anak yang dipekerjakan dengan berbagai keterbatasan lainnya. Informasi mengenai anak-anak yang bekerja pada sektor informal kemungkinan besar akan sulit untuk

diidentifikasi, perbedaan antara anak yang dipekerjakan oleh keluarga dan anak yang menolong atau membantu pekerjaan rumah tangga sulit untuk dibedakan dan apabila dilarang tentu akan menjadi permasalahan yang baru baik bagi pemerintah maupun keluarga.

Kasus yang dapat dijadikan contoh untuk anak yang dipekerjakan pada sektor formal salah satunya adalah sebuah *Multinational Corporation* (MNC), perusahaan kapas milik Amerika Serikat yaitu Monsanto yang beroperasi sejak tahun 1949 hingga sekarang yang menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja. Monsanto sebagai MNC memberikan pengaruh dan kontribusi cukup besar dalam perekonomian India selama ini dengan menjadikan India menjadi negara eksportir kapas terbesar di dunia saat ini. Semakin besar pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh suatu Negara atau MNC atas suatu negara membuat mereka memiliki pengaruh yang kuat pula dalam politik global. Besarnya pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh Monsanto di India juga akan berpengaruh terhadap politik Negara tersebut. Monsanto menggunakan anak-anak dibawah umur 14 tahun untuk bekerja tanpa upah yang layak di India tidak membuat pemerintah India untuk mengambil tindakan terhadap Monsanto dan Mengeluarkan Monsanto dari India (GMWatch, 2005). Tindakan tersebut tidak dilakukan tentu saja dengan alasan yang mempengaruhi seperti Monsanto meningkatkan hasil produksi pertanian di India dan berhasil menjadikan India sebagai penghasil kapas nomor satu didunia dan Monsanto sebagai MNC mampu menyerap tenaga kerja di India.

Monsanto mejadi salah satu contoh MNC yang menerapkan praktik pekerja anak di India tetapi juga mampu mempengaruhi dunia perpolitikan di India dengan tetap mempertahankan kedudukannya di India hingga sekarang. Bahkan,

hubungan kerja sama ekonomi antara India dengan Amerika Serikat terus meningkat dan mampu mempengaruhi PDB India menjadi terbesar didunia pada tahun 2012 dan mempererat hubungan kerja sama terhadap kedua negara tersebut. Hal ini membuat India menjadi lebih terbuka terhadap investasi dari luar untuk masuk ke India dan menambah pendapatan ekonomi dari perusahaan-perusahaan dan MNC yang masuk ke India (Kamdar, 2006-2007).

Ekonomi yang maju tidak menjamin bahwa sebuah Negara terhindar dari permasalahan lainnya. Dengan sikap dan keputusan pemerintah yang terkesan acuh dengan permasalahan pekerja anak, organisasi-organisasi dan LSM internasional maupun domestik menuntut pemerintah India untuk segera mengurangi kasus pekerja anak di India. tekanan dari domestik dan internasional ini tentu membuat pemerintah India harus mengambil jalan tengah yang di antara pekerja anak dan pertumbuhan ekonomi India sehingga terciptanya kebijakan saat ini dilarangnya pekerja anak hanya di sektor formal, tidak dengan sektor informal.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan internasional yang mengatur tentang pekerja anak yaitu Konvensi ILO 138 yang mengatur tentang usia minimum dan Konvensi ILO 182 yang mengatur tentang bentuk terburuk dari pekerja anak, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India tidak melanggar dan tetap dalam batasan peraturan yang berlaku, hanya saja yang menjadi kritik bagi masyarakat dan organisasi-organisasi internasional maupun domestik di India adalah lemahnya upaya pemerintah India untuk mengurangi pekerja anak dan melalui kebijakan tersebut dikhawatirkan mempromosikan pekerja anak pada sektor informal.

3.1.3. Sosial

Pekerja anak yang diizinkan melakukan aktivitasnya memiliki dampak tersendiri bagi keluarga miskin di India seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Keluarga miskin memerlukan pendapatan ekonomi lebih untuk mampu bertahan hidup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anaklah yang berperan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga tersebut dengan turut serta bekerja membantu orang tua maupun pekerjaan lainnya.

Anak-anak yang bekerja pada sektor informal setidaknya akan lebih terjaga keamanan dan kesehatannya, dengan bekerja pada keluarga sendiri jam kerja anak-anak akan lebih fleksibel dan kapasitas pekerjaan yang diberikan untuk anak-anak. Anak-anak yang bekerja juga akan lebih dapat diperhatikan oleh keluarganya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan hingga akhirnya eksploitasi terhadap pekerja anak akan dapat diminimalisir karena bekerja pada keluarga sendiri.

Pekerja anak tercipta dari keluarga miskin yang artinya orang tua di India yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal pada umumnya, dari ketidakmampuan tersebut anak-anak turut serta bekerja membantu orang tua mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja. Hal ini terus menerus terjadi pada keturunan-keturuan selanjutnya hingga menjadi tradisi dan merubah pola pikir masyarakat miskin pada umumnya untuk mengirim anak mereka ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk keluarga dari pada mengirim anak mereka ke sekolah formal.

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pekerja anak di India sebagian besar berakibat buruk bagi anak-anak itu sendiri. Namun, terdapat dampak lainnya yang menjadi keuntungan tersendiri seperti diantaranya anak-anak berkesempatan memiliki keterampilan tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan sejak usia dini dan telah memiliki keterampilan untuk mampu bertahan hidup. Tapi, hal itu tetap saja bukan sesuatu yang baik karena bukan suatu kewajiban dan keharusan bagi seorang anak untuk bertanggung jawab mencari pendapatan ekonomi bagi keluarganya sejak usia dini.

Dampak sosial lainnya yang akan secara langsung dialami oleh anak-anak yang bekerja sejak dini adalah anak-anak tidak mendapatkan waktu yang luang untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada usia dibawah 14 tahun yang semestinya. Pendidikan dan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang yang merupakan hak setiap anak tidak didapatkan oleh anak-anak. Kesehatan psikis dan mental anak-anak juga menjadi terancam akibat dari pekerjaan yang dilakukan.

Konsekuensi *cost-benefit* dari pilihan kebijakan mengizinkan seluruh bentuk aktivitas pekerja anak dari ketiga aspek ekonomi, politik dan sosial memiliki dampak yang berbeda-beda. Rangkuman tabel perkiraan dari opsi kebijakan mengizinkan aktivitas pekerja anak dari uraian diatas sebagai berikut :

Table 5. Perkiraan *Cost – Benefit* jika pemerintah menjalankan kebijakan mengizinkan anak dibawah 14 tahun untuk Bekerja di sektor informal

	Cost	Benefit
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja anak kemungkinan akan lebih meluas. • Merusak sistem pasar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga miskin terbantu dengan pertolongan anak. • Anak-anak meningkatkan pendapatan

	dengan upah yang rendah.	ekonomi keluarga maupun negara. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penghasilan keluarga. • Biaya produksi rendah.
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Kritik dari organisasi dan LSM internasional maupun dalam negeri untuk mengurangi jumlah pekerja anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah pendapatan ekonomi negara dengan bekerja diperusahaan asing (MNC). • Menjaga stabilitas ekspor negara dengan produksi yang besar dengan biaya yang kecil. • Hubungan kerjasama dengan Negara lain atau MNC yang menggunakan anak sebagai tenaga kerja berjalan baik. • Tetap mematuhi peraturan internasional meskipun pekerja anak masih terjadi.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan anak-anak tidak terjamin. • Anak-anak memiliki kesempatan yang kecil untuk belajar dan memperoleh pendidikan. • Mental, psikis dan pertumbuhan anak-anak akan terganggu. • Pengangguran pada orang dewasa akan bertambah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak belajar tanggungjawab sejak dini. • Waktu kerja yang lebih fleksibel. • Anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja. • Anak-anak mampu mendapatkan penghasilan sendiri. • Anak-anak yang bekerja tetap mendapat perlindungan dari keluarga.

3.2.Konsekuensi (Cost & Benefit) Pilihan Kebijakan Larangan Anak dibawah Umur 14 Tahun untuk Bekerja

3.2.1. Ekonomi

Opsi kebijakan melarang seluruh bentuk aktivitas pekerja anak kemungkinan besar akan secara langsung dan lebih banyak dampaknya ke anak-anak itu sendiri secara pribadi. Anak-anak yang tidak diperbolehkan untuk bekerja akan memberikan dampak secara langsung kepada anak-anak tersebut dan keluarga miskin. Sumber penghasilan yang biasanya didapatkan dari seluruh anggota keluarga akan di bebaskan kepada orang tua secara penuh. Hal ini tentu akan menjadi perubahan besar yang memiliki arti perubahan pendapatan ekonomi secara drastis bagi keluarga miskin di India (Souza, 2015). Tindakan melarang

seluruh aktivitas pekerja anak ini setidaknya harus memiliki rencana kedepannya menghadapi perubahan besar yang terjadi.

Dalam skala yang lebih besar seperti negara dan perusahaan-perusahaan ataupun MNC yang mempekerjakan anak-anak akan merasakan dampak yang cukup besar. Perusahaan-perusahaan akan kehilangan produktivitas dari anak-anak dan harus di ganti dengan pekerja yang lebih dewasa tentu saja dengan upah yang lebih besar juga dibandingkan pekerja anak-anak. Apabila kebijakan ini dijalankan kemungkinan perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja dewasa untuk mengurangi jumlah pengeluaran upah pekerja dan produktivitas perusahaan jelas akan ikut menurun dengan jumlah pekerja yang sedikit. Negara seperti India sebagai eksportir juga akan terkena dampaknya, ekspor yang sedikit tentu akan mendapatkan penerimaan yang sedikit pula.

Dalam sebuah penelitian, dampak larangan pekerja anak di India melalui Undang-Undang Pekerja Anak (*Prohibition & Regulation*) Act tahun 1986 yang menetapkan usia minimum legal masuk ke pasar tenaga kerja pada usia 14 tahun, menunjukkan bahwa undang-undang tersebut meningkatkan pekerja anak di sektor informal, pengurangan upah pada pekerja dan terjadi penurunan kehadiran disekolah (Bharadwaj, Lakdawala, & Li, 2014).

Namun, kemungkinan yang dapat terjadi apabila opsi kebijakan ini dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau *benefit* terutama terhadap anak-anak secara langsung. Anak-anak yang tidak bekerja akan melakukan aktivitas yang semestinya dilakukan oleh anak-anak pada umumnya seperti bersekolah atau belajar baik dipendidikan formal maupun non-formal seperti pelatihan kejuruan

dan lain sebagainya. Dengan anak-anak yang memperoleh pendidikan sejak dini hingga anak-anak mencapai usia di perbolehkan untuk bekerja, setidaknya anak-anak yang beranjak dewasa tersebut akan mendapatkan pekerjaan dan upah yang lebih baik dari sebelumnya dengan dasar dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Diperlukan komitmen yang kuat dan dasar hukum yang kuat beserta sanksi-sanksi yang tegas agar upaya ini dapat di wujudkan.

Secara keseluruhan, dalam dampak ekonomi yang ditimbulkan akan terjadi penurunan pendapatan dalam segala aspek dalam jangka waktu yang pendek dan akan menjadi keuntungan dalam jangka waktu yang panjang namun tidak diketahui secara pasti untuk waktu yang berapa lama dan hasil yang belum diketahui secara pasti.

3.2.2. Politik

Opsi kebijakan melarang seluruh bentuk aktivitas pekerja anak akan menjadi pekerjaan lebih bagi pemerintah India. Perubahan besar dan dampak yang ditimbulkan akan menjadi beban dan tanggungjawab pemerintah India menjamin bahwa keluarga miskin yang perekonomiannya selama ini dibantu oleh anak mereka kini harus dibantu oleh pemerintah India dengan program-program yang menjamin kelayakan hidup keluarga miskin di India. Jaminan sosial dan jaring pengaman masyarakat harus di perkuat agar masyarakat miskin bisa menghadapi guncangan besar yang terjadi.

Dampak yang ditimbulkan untuk pemerintah India lainnya adalah komitmen mematuhi peraturan internasional yang di buat oleh ILO dan telah di ratifikasi oleh pemerintah India menjadi komitmen bersama untuk mengurangi

pekerja anak di India. Hal ini tentu saja menjadi hal yang positif bagi organisasi dan NGO internasional maupun domestik seperti ILO dan UNICEF yang peduli dengan permasalahan pekerja anak dan mendukung upaya dari pemerintah India untuk mengurangi pekerja anak.

Kebijakan melarang seluruh aktivitas pekerja anak akan mengeluarkan biaya lebih untuk menjamin kehidupan masyarakat dengan jaring pengaman sosial yang dibuat. Namun, dampak ini hanya akan terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah India dalam jangka panjang apabila komitmen ini tetap bertahan dan diteruskan dalam pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Kualitas sumber daya manusia dan kemampuan atas keterampilan khusus lainnya akan menaikkan taraf hidup masyarakat yang sebelumnya berlatar belakang keluarga miskin menjadi keluarga yang lebih baik lagi dengan pendidikan dan pendapatan yang layak dari sebuah pekerjaan.

Pemerintah India akan sangat kesulitan dengan *cost* yang dikeluarkan atau beban anggaran pemerintah yang digunakan untuk menanggung biaya hidup masyarakatnya. Jika kebijakan ini dilaksanakan, anggaran pemerintah untuk menjalankan antisipasi guncangan pada keluarga miskin dengan menyediakan jaminan hidup dan jaring pengaman sosial akan mengakibatkan pengeluaran yang sangat besar mengingat jumlah penduduk India yang sangat banyak dan tingkat kemiskinan yang cukup besar. Anggaran pemerintah India sebagian besar harus di alihkan kepada kesejahteraan masyarakat dengan harus mengorbankan kebutuhan lainnya tentu akan menjadi pertimbangan yang berat dan sulit bagi pemerintah India untuk mengambil kebijakan tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja

(APBN) India sendiri sering terjadi kekurangan setiap tahunnya untuk kebutuhan negara.

3.2.3. Sosial

Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan dilarangnya seluruh bentuk aktivitas pekerja anak tentu memiliki kekurangan dan kelemahannya. Selain *cost* yang telah disebutkan sebelumnya pada aspek ekonomi dan politik yaitu pendapatan yang berkurang baik keluarga miskin, perusahaan-perusahaan maupun negara, anak-anak juga tidak memiliki keterampilan khusus dan pengalaman dalam dunia pekerjaan. Anak-anak harus mempelajari dan memahami dari awal tentang dunia kerja. Namun, hal itu tentu dapat diantisipasi dengan dipelajari dan diajarkan pada sekolah formal maupun pendidikan khusus atau kejuruan.

Meskipun anak-anak yang bekerja ada juga yang bersekolah, namun mayoritas pekerja anak adalah mereka yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Dalam sebuah studi yang membandingkan tahun-tahun sebelum adanya (*Prohibition & Regulation*) Act tahun 1986, terjadi penurunan angka partisipasi sekolah yang cukup signifikan pada usia 6-9 tahun akibat dari dijalkannya peraturan tersebut (Bharadwaj, Lakdawala, & Li, 2014). Namun, dengan adanya jaring pengaman sosial dan jaminan hidup yang dipersiapkan oleh pemerintah India segala kemungkinan terburuk dari penerapan kebijakan ini akan mudah diselesaikan.

Meskipun masih terdapat kekurangan, benefit dari kebijakan melarang segala bentuk aktivitas pekerja anak mendatangkan lebih banyak *benefit* dalam jangka waktu yang panjang. Menerapkan kebijakan ini sama halnya dengan

investasi sumber daya manusia untuk masa depan dengan menyiapkan anak-anak yang lebih berpendidikan. Kesehatan mental dan psikis anak-anak akan lebih terjaga dengan tidak terlibat dalam segala bentuk pekerjaan dan dapat kembali fokus untuk bersekolah dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Kebijakan anak-anak yang tidak diperbolehkan untuk bekerja akan berdampak pada tingkat pengangguran di India. Anak-anak yang sebelumnya dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan di India akan berhenti dipekerjakan oleh perusahaan dan diganti dengan pekerja dewasa yang dimana peluang atau kesempatan kerja untuk orang dewasa akan terbuka cukup banyak dengan upah yang layak. Hal ini akan memperbaiki sistem pasar kerja di India sebagaimana mestinya. Apabila kebijakan ini dijalankan dengan komitmen penuh disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas oleh pemerintah maka pekerja anak akan berkurang cukup signifikan.

Konsekuensi *cost-benefit* dari pilihan kebijakan melarang seluruh bentuk aktivitas pekerja anak dari ketiga aspek ekonomi, politik dan sosial memiliki dampak yang berbeda-beda, konsekuensi dari kebijakan ini sebagian besar kebalikan dari pilihan kebijakan melarang aktivitas pekerja anak. Rangkuman tabel perkiraan dari opsi kebijakan melarang seluruh bentuk aktivitas pekerja anak dari uraian diatas sebagai berikut:

Table 6. Perkiraan *Cost – Benefit* jika pemerintah menjalankan kebijakan larangan anak dibawah umur 14 tahun untuk bekerja

	Cost	Benefit
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan keluarga akan menurun drastis. • Produksi perusahaan-perusahaan akan menurun. • Pendapatan negara dari ekspor akan menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak akan kembali bersekolah. • Anak-anak menjadi investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka panjang

Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang besar untuk jaminan sosial dan jaring pengaman masyarakat. • Hubungan dengan perusahaan-perusahaan MNC akan terganggu. • Estimasi waktu tidak diketahui untuk mencapai tujuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan dengan ILO dan UNICEF serta LSM atau NGO yang peduli dengan pekerja anak dapat berjalan lebih baik. • Pemerintah India menjalankan komitmennya menguarangi pekerja anak sesuai dengan ratifikasi konvensi ILO.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Anak tidak mendapatkan keterampilan tentang pekerjaan • Anak-anak terancam menjalani pekerjaan bawah tanah yang sulit di lacak pemerintah India (prostitusi DLL). • Keluarga miskin akan mengalami perubahan pendapatan ekonomi secara drastis. • Tingkat pekerja anak pada sektor informal kemungkinan akan meningkat. • Angka kehadiran anak-anak di sekolah kemungkinan berkurang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak dapat kembali bersekolah di pendidikan formal maupun pendidikan khusus. • Kesehatan mental dan psikis anak-anak lebih terjaga. • Anak-anak dapat melakukan aktifitas seperti anak-anak pada umumnya. • Pengangguran akan berkurang dengan terbukanya peluang kerja bagi orang dewasa. • System pasar kerja kembali normal dengan kembalinya orang dewasa yang bekerja dengan upah yang layak. • Pola pikir masyarakat akan berubah dengan berpikiran harus mengantar anak-anak mereka ke sekolah. • Pekerja anak akan berkurang.

3.3.Konsekuensi (Cost & Benefit) Kebijakan Pengembangan dan Pelatihan Kejuruan

3.3.1. Ekonomi

Pendidikan, pengembangan keterampilan, dan belajar dari pengalaman merupakan salah satu nilai utama untuk mempekerjakan seorang pekerja. Pekerja dengan pendidikan, keterampilan dan pengalaman akan meningkatkan kondisi kelayakan kerja dan standar hidup pekerja, berkontribusi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pembangunan sosial. Selain ekonomi dan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan juga berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan memberikan landasan bagi masyarakat. Pendidikan dan pelatihan adalah sarana

untuk memberdayakan masyarakat. Meningkatkan kualitas dan kerja organisasi, meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatkan pendapatan pekerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan mempromosikan jaminan kerja serta kesetaraan dan inklusi sosial. Pengembangan keterampilan adalah pilar mendasar dari pekerjaan yang layak dengan visi pembelajaran pengalaman yang konsisten dengan kebijakan publik dibidang ekonomi, fiskal, sosial dan pasar tenaga kerja, yang semuanya penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sosial.

Pengembangan keterampilan adalah dasar daya saing ekonomi dan perusahaan. Dari perspektif sosial, pekerja yang memiliki keterampilan adalah alat untuk memerangi kemiskinan, mempromosikan kesempatan yang sama dengan mengintegrasikan orang dalam hal tenaga kerja, konteks sosial, dan kewarganegaraan. Pelatihan kejuruan merupakan salah satu kebijakan yang di laksanakan untuk mencapai tujuan utama dari strategi pekerjaan yang layak (Sharma D. R., 2016).

Pengembangan keterampilan untuk kelayakan kerja merupakan strategi penting dalam upaya memerangi kemiskinan. Masyarakat miskin akan memiliki akses mudah dan peluang untuk melakukan pengembangan keterampilan apabila program yang dijalankan oleh pemerintahan Narendra Modi sejak 2015 ini terus dijalankan. Kebijakan ini dapat mengurangi dampak hambatan ekonomi pada berbagai tahap, secara aktif mempromosikan keluarga miskin ke kesempatan untuk melakukan pengembangan pendidikan dan keterampilan melalui skema dan tindakan yang dirancang. Langkah seperti pembinaan yang berkompetensi untuk

dapat masuk, penyediaan peluang pengembangan keterampilan non-formal dan perluasan penyediaan beasiswa dan pinjaman.

3.3.2. Politik

Kebijakan nasional pengembangan keterampilan dan kejuruan merupakan salah satu kebijakan yang sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah India melalui kebijakan yang telah dikeluarkan dan dijalankan hingga sekarang. Kementerian pengembangan keterampilan dan kewirausahaan (MSDE) bertanggung jawab atas dijalanannya program ini.

Inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2009 dan 2014 untuk menjalankan program ini merupakan suatu langkah yang dapat dikatakan tepat dengan yang di butuhkan masyarakat dan keluarga miskin di India saat ini. Pendidikan, keterampilan dan pengalaman akan menjadililai tambah dari seorang pekerja yang dapat menaikkan taraf hidup masyarakat miskin di India. Dengan kemampuan dan keterampilan terhadap suatu pekerjaan, seorang pekerja akan mendapatkan upah yang lebih layak sesuai dengan kemampuan dan kontribusi yang dapat diberikan terhadap tempat seseorang tersebut bekerja.

Keuntungan bagi pemerintah India adalah sekolah vokasi atau kejuruan terbesar di India merupakan perusahaan milik swasta yang bekerja sama dengan pemerintah India yaitu Kementerian Pengembangan Keterampilan dan Keirausahaan (MSDE) dan Kementerian Keuangan India yang dimana Pemerintah India memegang sebagian aset perusahaan tersebut. Dengan pengelolaan yang di pegang oleh swasta, pemerintah tidak perlu mengeluarkan upaya dan tenaga lebih besar.

India yang merupakan salah satu negara yang mendukung dan menjalankan MDG's yang diusung dan diterapkan oleh negara-negara diseluruh dunia akan terbantu dengan dijalankannya kebijakan ini. Salah satu pilar dari MDG'S yaitu mengurangi kemiskinan yang juga menjadi salah satu upaya pemerintah India untuk mengurangi angka kemiskinan akan menjadi satu tujuan dengan dua hasil yang berbeda. Dari dalam negeri, upaya mengurangi kemiskinan menjadi misi nasional sejak dulu hingga kini yang salah satu upaya menguranginya adalah menjadikan pekerja India lebih memiliki keterampilan dan keahlian serta berpendidikan. Sementara, India melalui program ini juga mendapatkan *benefit* dari pandangan internasional yang dimana melalui kebijakan ini dunia internasional akan melihat kebijakan ini sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan yang menjadi pilar dalam MDG'S dan membuat pekerja yang memiliki keterampilan lebih dan keahlian, menjadi tenaga kerja bukan hanya untuk domestik tetapi juga bersaing dengan tenaga kerja internasional.

3.3.3. Sosial

Kebijakan pengembangan keterampilan dan kejuruan memiliki dampak yang cukup berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lingkungan ekonomi dan sosial yang kondusif, pengembangan keterampilan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja orang dan perusahaan, yang menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan pembangunan bagi masyarakat. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan memiliki kondisi kerja dan upah yang lebih baik, kemampuan kerja yang lebih tinggi dan kesetaraan hidup akan menjadi lebih baik. Mengembangkan kualifikasi dan kapabilitas harus menjamin kapasitas pekerja untuk beradaptasi

dengan perubahan dalam teknologi pengaturan pekerjaan. Pelatihan kejuruan dapat menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri dan berkontribusi pada keterlibatan pekerja secara individu dengan keluarga dan masyarakatnya, terutama masyarakat miskin pedesaan di India.

Pengembangan kompetensi adalah suatu hal yang penting dan dapat dikembangkan menjadi lebih agar angkatan kerja dapat beralih dari perekonomian informal beralih ke perekonomian yang formal untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pengembangan kompetensi yang dilakukan juga akan menjadikan posisi suatu pekerjaan ke kualitas yang lebih tinggi, tingkat pekerjaan dan formalitas yang lebih tinggi, pengurangan kemiskinan, inklusi sosial, penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja dan daya saing dipasar internasional (Sharma D. R., 2016).

Dampak sosial dari kebijakan pengembangan dan pelatihan kejuruan mencakup banyak hal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, masalah seperti mengurangi tingkat kekerasan dan kejahatan, lebih terintegrasi dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan pelatihan yang baik mendorong bersama untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, motivasi, nilai yang lebih baik yang semuanya mengarah pada integrasi sosial yang baik. Dengan kompetensi tersebut, kebijakan pengembangan dapat menjadi produk ideal dari upaya mengurangi keluarga miskin di India yang hingga nanti pada akhirnya pekerja anak akan berkurang.

Dalam rencana kebijakan pemerintah India pada tahun 2009, setidaknya ada beberapa hal yang lebih ditekankan dari kebijakan ini cukup efektif untuk

mengurangi pekerja anak dan anak-anak yang berhenti atau keluar dari sekolah. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mengatasi pekerja anak dan anak yang berhenti sekolah yang tertuang dalam inisiatif rencana kebijakan '*National Skill development*' tahun 2009, diantaranya (The National Skill Development, 2009) :

1. Pendidikan sekolah akan diperkuat untuk mengurangi putus sekolah. Kualitas pendidikan sekolah akan memengaruhi efektifitas program pengembangan keterampilan secara keseluruhan. Ini akan menjadi dasar bagi kaum muda untuk memperoleh keterampilan yang dapat dipekerjakan dan terlibat dalam peningkatan keterampilan berkelanjutan.
2. Pendidikan sekolah akan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran vokasi di kalangan kaum muda.
3. Pekerja anak dan remaja putus sekolah perlu untuk diberikan pendidikan alternatif ditambah dengan peluang pengembangan keterampilan untuk membawa mereka ke dalam arus utama.
4. Program jangka pendek, berorientasi pasar, dan di dorong oleh permintaan akan memberikan kerangka kerja pengiriman yang fleksibel yang sesuai dengan karakteristik dan keadaan kelompok sasaran.
5. Multi-keterampilan dan keterkaitan dengan peluang peningkatan keterampilan dimasa depan, akan menjadi ciri program tersebut. Skema Keterampilan yang dapat di pekerjakan modular (yaitu keterampilan yang dapat dipekerjakan jangka pendek) akan diperluas untuk memenuhi ukuran kelompok yang besar.

6. Persyaratan pendidikan formal dalam mengakses pelatihan akan di tinjau untuk memudahkan akses.

Konsekuensi *cost-benefit* dari pilihan kebijakan pengembangan dan pelatihan kejuruan dari ketiga aspek ekonomi, politik dan sosial memiliki dampak yang berbeda-beda. Umumnya, kebijakan ini lebih mengarah kepada orang yang lebih dewasa namun berpengaruh bagi anak-anak. Rangkuman tabel perkiraan dari opsi kebijakan pengembangan dan pelatihan kejuruan dari uraian diatas sebagai berikut:

Table 7. Perkiraan *Cost & Benefit* jika pemerintah menjalankan kebijakan pengembangan dan pelatihan kejuruan

	Cost	Benefit
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak masih akan terlibat dalam pekerja anak. • Sasaran lebih banyak di tujukan untuk remaja dan orang dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kerja organisasi. • Meningkatkan produktivitas masyarakat. • meningkatkan pendapatan pekerja. • Meningkatkan taraf hidup masyarakat. • meningkatkan daya saing perusahaan. • mempromosikan jaminan kerja serta kesetaraan dan inklusi sosial. • Meningkatkan daya saing pekerja. • memerangi kemiskinan. • mempromosikan kesempatan yang sama dengan mengintegrasikan orang dalam hal tenaga kerja. • Dalam jangka waktu panjang, keluarga miskin semakin berkurang dan pekerja anak juga akan semakin berkurang.
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung upaya global dalam mencapai tujuan dari MDG's • Dapat Bekerja sama dengan instansi non-pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan keterampilan.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat akan cenderung memilih pendidikan pengembangan keterampilan dan kejuruan dibandingkan sekolah formal pada umumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • kondisi kerja dan upah yang lebih baik. • Kemampuan kerja yang lebih tinggi dan kesetaraan hidup akan menjadi lebih baik. • Mengembangkan kualifikasi dan kapabilitas harus menjamin kapasitas

		<p>pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi pengaturan pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri. • Berkontribusi secara individu dengan keluarga dan masyarakatnya, terutama masyarakat miskin pedesaan di India.
--	--	---

3.4.Konsekuensi (Cost & Benefit) Kebijakan Pendidikan Gratis untuk Anak-anak Mendapatkan Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan salah satu cara alternatif solusi paling diutamakan dan paling tepat untuk mengurangi pekerja anak. Pendidikan dalam hal ini sekolah formal ataupun pendidikan keterampilan dan kejuruan akan mampu menggantikan aktivitas anak-anak yang bekerja menjadi kembali seperti aktivitas anak-anak pada umumnya yaitu belajar, bersekolah dan mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sehat.

Pemerintah India baru mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2020 yaitu kebijakan pendidikan gratis di India untuk anak-anak secara nasional dengan kebijakan yang bernama '*National Education Policy 2020*' yang dikeluarkan oleh pemerintah India melalui Kementerian Pengembangan Sumber daya Manusia (MHRD). Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan formal melainkan juga pada pendidikan pengembangan keterampilan dan kejuruan di India.

3.4.1. Ekonomi

Pendidikan memiliki konsekuensi tersendiri bagi anak-anak dan keluarga miskin di India, pendidikan gratis secara nasional dan menyeluruh di India dapat

dijadikan opsi terbaik untuk membantu keluarga miskin dan anak-anak yang ingin memperoleh pendidikan. Pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk membangun kualitas anak-anak yang nantinya akan menjadi tenaga kerja pada masa yang akan datang, anak-anak yang memiliki kualitas dan kemampuan akan menjadi sumber daya manusia yang lebih berharga dan akan memiliki nilai lebih untuk dipekerjakan. Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki akan menaikkan derajat dalam tingkat pekerjaan dan upah yang layak dan sesuai dalam suatu pekerjaan hingga akhirnya dengan pekerjaan dan upah yang layak, rantai kemiskinan dalam suatu keluarga akan putus dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Guncangan ekonomi mempengaruhi pilihan orang tua antara pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anak. Perubahan tak terduga dalam pendapatan keluarga karena kehilangan pekerjaan memberikan motivasi orang tua untuk melihat anak sebagai asuransi dalam suatu perekonomian. Pekerja anak sebagai suatu bentuk asuransi meminimalkan risiko yang menyiratkan bahwa pekerja anak dapat bertahan bahkan pada saat rumah tangga mungkin tidak membutuhkan pendapatan anak untuk mata pencaharian pada waktu normal. Anak-anak dianggap sebagai asuransi atas ketidakpastian masa depan. Orang tua berinvestasi dalam jumlah dan kualitas anak-anak untuk memaksimalkan nilai keluarga. Kualitas orang tua menjadi penting, orang tua dengan pendidikan tinggi diharapkan memiliki pendapatan masa depan yang lebih tinggi dengan mengansurakan dirinya sendiri dibandingkan pekerja anak. Wawasan ini menunjukkan bahwa determinan ukuran keluarga yang optimal akan menentukan perkembangan sumber daya manusia. Keluarga yang tidak memiliki akses kredit

lebih memungkinkan untuk menarik anak-anak dari sekolah ketika menghadapi penurunan ekonomi (Zahid Siddique, 2019).

Kebijakan pendidikan gratis akan membantu keluarga miskin untuk dapat memberikan pendidikan pada anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan. Dengan akses pendidikan yang murah bahkan tanpa mengeluarkan biaya tidak ada alasan bagi anak-anak untuk tidak bersekolah atau mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan baik dari pendidikan formal maupun pengembangan keterampilan dan kejuruan.

Harga yang harus dibayar dari kebijakan ini bagi keluarga miskin adalah keluarga miskin akan kehilangan sumber penghasilan anak-anak yang selama ini ikut bekerja menambah perekonomian keluarga mereka. Dengan hilangnya sumber pendapatan, keluarga miskin yang sumber pendapatannya hanya dari orang tua harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pendapatan lebih. Namun, hal itu hanya akan bertahan setidaknya dalam jangka waktu yang cukup pendek atau sampai anak-anak berada diatas usia 14 tahun setelah menyelesaikan pendidikan yang dijalani.

3.4.2. Politik

Millenium Development Goals (MDG's) secara langsung tidak mengatur tentang pekerja anak, namun melakukannya secara tidak langsung melalui pendidikan untuk semua. Beberapa kemajuan telah mencapai sasaran menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tingkat pendidikan sekolah dasar anak-anak di negara berkembang meningkat dari 83% pada tahun 2000 menjadi 88% pada tahun 2007. Pada periode yang sama, Asia selatan mengalami

peningkatan angka partisipasi dari 79% menjadi 90%. Meskipun demikian, ILO melaporkan bahwa India dan Pakistan memiliki populasi anak putus sekolah terbesar didunia. Keterkaitan antara upaya penghapusan pekerja anak dan ketentuan pendidikan dasar secara universal penting karena tujuannya adalah agar anak-anak mengalami perpindahan dari bekerja ke sekolah daripada menganggur. ILO memberikan alasan ekonomi yang jelas untuk menghilangkan kebijakan pekerja anak didasarkan pada keuntungan besar dari perpindahan anak dari bekerja ke sekolah dan menyelesaikan seridaknya pendidikan dasar sebelum kembali bekerja. Perpindahan antara anak yang bekerja ke pendidikan penting jika upaya untuk menghilangkan pekerja anak mengurangi kemiskinan dan mendapatkan hasil pendapatan yang lebih tinggi, keduanya merupakan hasil yang diinginkan untuk negara-negara di Asia Selatan termasuk India dimana lebih dari 40% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan (Mukhopadhaya, Bhattacharya, & Macmillan, 2012).

Dampak politik yang akan ditimbulkan dari kebijakan ini hampir sama halnya seperti konsekuensi yang disebutkan pada dampak politik pengembangan dan pelatihan kejuruan. *Cost* yang harus dikeluarkan adalah anggaran negara yang akan banyak di gunkan untuk kebutuhan pendidikan nasional baik formal maupun pengembangan dan pelatihan kejuruan. Kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan tidak hanya sebatas kurikulum dan materi yang dipelajari, tenaga pendidik juga harus diberikan pelatihan agar anak-anak yang memperoleh pendidikan nantinya memiliki nilai tambah ketika memasuki pasar kerja.

Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah India akan banyak di habiskan untuk anggaran pendidikan nasional, tapi, itu semua akan menjadi *benefit* bagi

pemerintah India di masa mendatang. Anak-anak yang memperoleh pendidikan akan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik, dengan pekerjaan yang lebih baik akan mendapatkan upah yang tinggi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

3.4.3. Sosial

Dampak perubahan pendapatan ekonomi dalam masyarakat akan terjadi, kehilangan sumber pendapatan dari anak yang sebelumnya bekerja akan berkurang atau mungkin tidak menghasilkan pendapatan. Tapi hal ini akan membuka peluang baru bagi orang-orang dewasa untuk dapat kembali bekerja. Anak-anak yang kembali bersekolah akan banyak meninggalkan lapangan pekerjaan bagi orang dewasa. Dengan lapangan pekerjaan yang semakin terbuka untuk orang dewasa, pengangguran pada orang dewasa akan berkurang dan tingkat pengangguran dan kemiskinan akan berkurang dengan tersedianya lapangan pekerjaan.

Program pendidikan gratis yang baru dijalankan oleh pemerintah India juga bermanfaat bagi pekerja dewasa. Kebijakan *National Education Program* (NEP) 2020 bukan hanya berfokus pada pendidikan formal pada anak-anak, program ini juga menyediakan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi orang dewasa yang nantinya akan bermanfaat bagi pekerja dewasa di India.

Ada faktor lain yang sebenarnya cukup mempengaruhi dan menyebabkan banyak anak-anak di India tidak bersekolah, faktor sosial budaya dan kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat di India. Secara tradisional, pendidikan di India hanya dimaksudkan dan dapat diakses oleh kasta atas laki-laki dan nilai-

nilai itu masih ada. Pendidikan dianggap tidak diperlukan untuk kasta yang lebih rendah atau wanita oleh sebagian besar populasi. Sistem kepercayaan juga bertanggungjawab atas pekerja anak di India (Jha, 2008, p. 210).

India merupakan salah satu negara dengan tingkat buta huruf dan tingkat literasi yang buruk. Salah satu alasan penting mengapa India memiliki tingkat buta huruf yang rendah dan tingkat putus sekolah yang tinggi adalah manfaat yang didapatkan dari sekolah dengan kualitas yang rendah. Hal ini menjadi dorongan dari orang tua untuk menarik anak-anak untuk tinggal dirumah dan mempelajari keterampilan atau mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga. Tetapi jika orang tua yakin bahwa sekolah akan membawa perubahan ekonomi yang positif pada kondisi mereka dalam jangka panjang, keluarga miskin akan berkorban dalam jangka pendek. Orang tua akan lebih bersedia menyekolahkan anaknya jika sekolahnya berkualitas. Bahkan keluarga miskin terkadang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk pendidikan anak-anak mereka. Ketidakmampuan sistem sekolah untuk menarik dan menjaga anak lebih penting daripada ekonomi rumah tangga untuk menjelaskan mengapa begitu banyak anak tidak bersekolah (Jha, 2008, p. 216).

Konsekuensi *cost-benefit* dari pilihan kebijakan pendidikan gratis oleh pemerintah India dari ketiga aspek ekonomi, politik dan sosial memiliki dampak yang berbeda-beda. Rangkuman tabel perkiraan dari opsi kebijakan/program pendidikan gratis dari uraian diatas sebagai berikut :

Table 8. Perkiraan *Cost & Benefit* jika pemerintah menjalankan kebijakan pendidikan gratis untuk anak-anak mendapatkan pendidikan formal

	Cost	Benefit
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perubahan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin Karena berkurangnya pendapatan dari anak-anak. • Keluarga miskin (orang tua) harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak terbebas dari pekerja anak • Anak-anak dapat kembali ke sekolah formal maupun kejuruan. • Anak-anak berkesempatan memperbaiki derajat hidup keluarga menjadi lebih baik di masa depan.
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mengeluarkan anggaran biaya lebih untuk akses pendidikan. • Pemerintah harus melatih tenaga pendidik dengan pelatihan agar sekolah menjadi lebih berkualitas. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mendukung upaya global mewujudkan tujuan dari MDG's. • Dapat mengurangi kemiskinan dalam masa mendatang. • Dapat mengurangi tingkat pengangguran di India pada orang dewasa.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan keluarga akan berkurang dalam jangka waktu yang pendek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi tingkat buta huruf di India. • Masyarakat miskin terbantu dengan tidak adanya biaya pendidikan. • Anak yang kembali sekolah dapat memperbaiki sistem pasar kerja di India • Orang dewasa dapat kembali bekerja menggantikan anak-anak. • Orang dewasa dapat memperbaiki taraf hidup dengan mengikuti pelatihan untuk pekerjaan dengan upah yang lebih layak.

Dari semua alternatif kebijakan yang telah dipaparkan, semuanya telah atau pernah dijalankan oleh pemerintah India sejak dahulu hingga saat ini, hanya efektivitas dan komitmen dalam menjalankan program yang membuat permasalahan pekerja anak masih sulit untuk diselesaikan. Dari empat opsi kebijakan dapat dijadikan salah satu yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan dari pemerintah India untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Opsi kebijakan yang telah disusun tentu masih banyak kekurangan dan kelebihan pada masing-masing pilihannya, akan menjadi lebih baik jika opsi-opsi kebijakan tersebut beberapa diantaranya dapat dikombinasikan untuk menutupi kekurangan antara satu opsi kebijakan dengan opsi lainnya. Untuk lebih ringkasnya akan diuraikan dalam tabel berikut :

Table 9. Kompilasi opsi alternatif kebijakan beserta *Cost & benefit*.

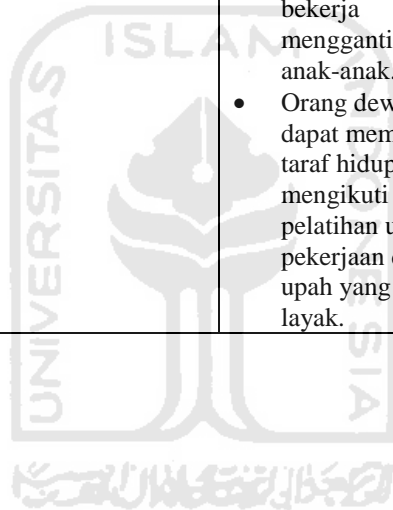
<i>Alternatives</i>	<i>Policy Impact</i>	<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	<i>Analisis Kebijakan</i>
Kebijakan Mengizinkan Anak Dibawah 14 Tahun Untuk Bekerja di Sektor Informal	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja anak kemungkinan akan lebih meluas. • Merusak sistem pasar kerja dengan upah yang rendah. 	<p>Keluarga miskin terbantu dengan pertolongan anak. Anak-anak meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga maupun negara. Meningkatkan penghasilan keluarga. Biaya produksi rendah.</p>	Kebijakan ini menjadi preferensi pertama yang diambil oleh pemerintah India. karena kebijakan ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah India dengan berbagai pertimbangan <i>Cost & Benefit</i> yang di dapatkan, serta kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah India dari pertimbangan dampak politik, ekonomi dan sosial yang terjadi pada masyarakat terutama keluarga miskin di India.
	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Kritik dari organisasi dan LSM internasional maupun dalam negeri untuk mengurangi jumlah pekerja anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah pendapatan ekonomi negara dengan bekerja di perusahaan asing (MNC). • Menjaga stabilitas ekspor negara dengan produksi yang besar dengan biaya yang kecil. • Hubungan kerjasama dengan negara lain atau MNC yang menggunakan anak sebagai tenaga kerja berjalan baik. • Tetap mematuhi peraturan internasional meskipun pekerja anak masih terjadi. 	
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan anak-anak tidak terjamin. • Anak-anak memiliki kesempatan yang kecil untuk belajar dan memperoleh pendidikan. • Mental, psikis dan pertumbuhan anak-anak akan terganggu. Pengangguran pada orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak belajar tanggungjawab sejak dini. • Waktu kerja yang lebih fleksibel. • Anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja. • Anak-anak mampu mendapatkan penghasilan sendiri. • Anak-anak yang bekerja tetap mendapat perlindungan dari keluarga 	

<i>Alternatives</i>	<i>Policy Impact</i>	<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	Analisis Kebijakan
		dewasa akan bertambah.		
Kebijakan Larangan Anak dibawah Umur 14 Tahun Bekerja.	Ekonomi	Pendapatan keluarga akan menurun drastis. Produksi perusahaan-perusahaan akan menurun. Pendapatan negara dari ekspor akan menurun.	Anak-anak akan kembali bersekolah. Anak-anak menjadi investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka panjang	Kebijakan ini menjadi preferensi kedua yang dapat diambil oleh pemerintah India. karena belum memungkinkan untuk dilakukan bagi pemerintah India maupun masyarakat di India. Kondisi ekonomi, politik dan sosial dari pemerintah India maupun masyarakat terutama keluarga miskin di India yang belum siap menghadapi perubahan yang terjadi apabila anak dilarang untuk bekerja pada sektor informal. Namun, ada kemungkinan kebijakan ini dapat dilakukan pada masa yang akan datang apabila pemerintah India mampu menanggulangi kemungkinan yang terjadi.
	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang besar untuk jaminan sosial dan jaring pengaman masyarakat. • Hubungan dengan perusahaan-perusahaan MNC kemungkinan akan terganggu. • Estimasi waktu tidak diketahui untuk mencapai tujuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan dengan ILO dan UNICEF serta LSM atau NGO yang peduli dengan pekerja anak dapat berjalan lebih baik. • Pemerintah India menjalankan komitmennya mengurangi pekerja anak sesuai dengan ratifikasi konvensi ILO 	
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Anak tidak mendapatkan keterampilan tentang pekerjaan • Anak-anak terancam menjalani pekerjaan bawah tanah yang sulit dilacak pemerintah India (prostitusi DLL). • Keluarga miskin akan mengalami guncangan besar. • Tingkat pekerja anak pada sektor informal kemungkinan akan meningkat. • Angka 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak dapat kembali bersekolah di pendidikan formal maupun pendidikan khusus. • Kesehatan mental dan psikis anak-anak lebih terjamin. • Anak-anak dapat melakukan aktifitas seperti anak-anak pada umumnya. • Pengangguran akan berkurang dengan terbukanya peluang kerja bagi orang dewasa. • Sistem pasar kerja kembali normal dengan kembalinya orang dewasa yang bekerja dengan upah yang layak. • Pola pikir 	

<i>Alternatives</i>	<i>Policy Impact</i>	<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	Analisis Kebijakan
		kehadiran anak-anak di sekolah kemungkinan berkurang	<p>masyarakat akan berubah dengan berpikiran harus mengantar anak-anak mereka ke sekolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja anak akan berkurang. 	
Kebijakan pengembangan dan pelatihan kejuruan.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran lebih banyak ditujukan untuk remaja dan orang dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kerja organisasi. • Meningkatkan produktivitas masyarakat. • meningkatkan pendapatan pekerja. • meningkatkan daya saing perusahaan. • mempromosikan jaminan kerja serta kesetaraan dan inklusi sosial. • Meningkatkan daya saing pekerja. • memerangi kemiskinan. • mempromosikan kesempatan yang sama dengan mengintegrasikan orang dalam hal tenaga kerja. • Dalam jangka waktu panjang, keluarga miskin semakin berkurang dan pekerja anak juga akan semakin berkurang. 	<p>Kebijakan ini menjadi preferensi ketiga yang diambil oleh pemerintah India. karena kebijakan ini cukup memungkinkan bagi pemerintah India untuk dapat dilakukan. Kebijakan yang telah dijalankan sejak 2015 ini apabila terus diupayakan akan mendatangkan hasil yang baik pada umumnya bagi pemerintah India dengan perhitungan <i>Cost & Benefit</i> yang telah diperkirakan. Kebijakan ini dapat memperbaiki system pasar kerja dan kualitas masyarakat di India pada masa mendatang.</p>
	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung upaya global dalam mencapai tujuan dari MDG's • Dapat Bekerja sama dengan instansi non-pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan keterampilan. 	
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat akan cenderung 	<ul style="list-style-type: none"> • kondisi kerja dan upah yang lebih 	

<i>Alternatives</i>	<i>Policy Impact</i>	<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	Analisis Kebijakan
		memilih pendidikan pengembangan keterampilan dan kejuruan dibandingkan sekolah formal pada umumnya.	<p>baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan kerja yang lebih tinggi dan kesetaraan hidup akan menjadi lebih baik. • Mengembangkan kualifikasi dan kapabilitas harus menjamin kapasitas pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi pengaturan pekerjaan. • Menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri. • Berkontribusi secara individu dengan keluarga dan masyarakatnya, terutama masyarakat miskin pedesaan di India. 	
Kebijakan Pendidikan Gratis Untuk Anak-anak Mendapatkan Pendidikan Formal	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Guncangan ekonomi bagi keluarga miskin karena berkurangnya pendapatan dari anak-anak apabila anak berfokus pada pendidikan. • Keluarga miskin (orang tua) harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak terbebas dari pekerja anak • Anak-anak dapat kembali ke sekolah formal maupun kejuruan. • Anak-anak berkesempatan memperbaiki derajat hidup keluarga menjadi lebih baik dimasa depan. 	Kebijakan ini menjadi preferensi keempat yang diambil oleh pemerintah India karena memungkinkan untuk dijalankan oleh pemerintah India. Pendidikan gratis oleh pemerintah India yang telah dijalankan sejak 2010 akan membantu mengurangi pekerja anak baik disektor formal maupun disektor informal. Pendidikan gratis akan membantu keluarga miskin untuk dapat menyekolahkan anak-anak dari
	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mengeluarkan anggaran biaya lebih untuk akses pendidikan. • Pemerintah harus melatih tenaga pendidik dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mendukung upaya global mewujudkan tujuan dari MDG's. • Dapat mengurangi kemiskinan dalam masa mendatang. • Dapat mengurangi tingkat pengangguran di 	

<i>Alternatives</i>	<i>Policy Impact</i>	<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	Analisis Kebijakan
		pelatihan agar sekolah menjadi lebih berkualitas.	India pada orang dewasa.	keluarga miskin di India dan dapat memperbaiki kualitas hidup keluarga miskin di India pada masa yang akan datang.
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan keluarga akan berkurang dalam jangka waktu yang pendek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi tingkat buta huruf di India. • Masyarakat miskin terbantu dengan tidak adanya biaya pendidikan. • Anak yang kembali sekolah dapat memperbaiki system pasar kerja di India • Orang dewasa dapat kembali bekerja menggantikan anak-anak. • Orang dewasa dapat memperbaiki taraf hidup dengan mengikuti pelatihan untuk pekerjaan dengan upah yang lebih layak. 	



BAB IV

KESIMPULAN

Fenomena pekerja anak adalah permasalahan yang kompleks untuk mampu diselesaikan, tidak hanya di India, hampir seluruh negara didunia memiliki pekerja anak bahkan dinegara maju sekalipun. Kemiskinan adalah faktor utama dari adanya pekerja anak, kemiskinan menyebabkan seluruh anggota keluarga turut berkontribusi untuk mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sistem pendidikan yang buruk, kualitas pendidikan dan biaya untuk mengakses pendidikan yang mahal menjadi pemburuk keadaan untuk meningkatkan terjadinya praktik pekerja anak.

India yang merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak kedua didunia, 40% masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan. Praktik pekerja anak di India terjadi sejak dahulu hingga saat ini, peraturan perundang-undangan (*prohibition and regulation*) Act sejak tahun 1986 tidak terlalu mempengaruhi jumlah pekerja anak yang terdapat di India. Peraturan perundang-undangan yang terus berubah-ubah oleh pemerintah India menggambarkan komitmen pemerintah yang belum serius dalam upaya mengurangi pekerja anak. Meskipun pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengatur tentang usia minimum diperbolehkan untuk bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 mengatur tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tari pekerja anak tidak serta merta membuat pemerintah India mematuhi sepenuhnya.

Aktor tertinggi dalam pemerintahan suatu negara memiliki peran penting untuk mengurangi jumlah pekerja anak di India. Aktor dalam hal ini Perdana

Menteri India khususnya dan pemerintah India umumnya harus mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keadaan seperti kapasitas, kapabilitas dan kemampuan pemerintah India untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pengambilan keputusan bukanlah suatu hal mudah, akan ada sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi pemerintah India. Aktor utama harus mampu membuat kebijakan yang rasional untuk kebutuhan negaranya dengan perhitungan *cost & benefit* yang matang agar segala kemungkinan yang terjadi dapat diantisipasi kemudian hari.

Pemimpin menghadapi banyak tuntutan dalam mengambil keputusan. Mereka harus mencari keputusan praktis dan bekerja dalam batasan yang mereka hadapi baik ditingkat domestik maupun internasional. Mereka harus mencapai keputusan dalam waktu minimum dan dalam lingkungan informasi yang saling bertentangan dan sering kali ambigu, bagaimana para pemimpin harus mengalokasikan waktu dan energi mereka dengan demikian dapat dikonseptualisasikan sebagai konsep pertukaran (*trade-off*). Pentingnya *trade-off* dalam pengambilan keputusan politik memberikan rasional analitik yang mengharuskan pembuat keputusan untuk mengidentifikasi dan memilih opsi yang kemungkinan besar akan mencapai tujuan kebijakan pada tingkat biaya dan resiko yang dapat diterima. Konsep rasionalitas politik mensyaratkan para pembuat keputusan tidak hanya mencapai keputusan yang berkualitas tinggi, tapi juga melakukannya dalam batasan *trade-off* yang diberlakukan oleh waktu, sumber daya, dan kebutuhan akan dukungan politik (baik dalam negeri maupun internasional). Berapa waktu yang harus dialokasikan untuk mencari informasi

lebih lanjut, opsi yang memungkinkan, berapa banyak orang yang harus dilibatkan dalam keputusan tersebut (Renshon & Renshon, 2008).

Teori *decision making* Graham T. Allison dengan menggunakan model rasional aktor yang digunakan oleh peneliti memahami bahwa setiap alternatif kebijakan yang dimiliki bertujuan untuk mencapai *goals* dan *objectives* yang dimiliki. Maka dari itu, dalam penerapannya pada penelitian ini alternatif kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah India terhadap pekerja anak memiliki *Goals* dan *objectives* atau tujuan utama yang sama yaitu mengurangi jumlah pekerja anak sesuai dengan Konvensi ILO 138 dan mengurangi kemiskinan di India sebagai faktor utama terjadinya pekerja anak meskipun karakteristik, latar belakang dan proses dalam menjalankan setiap alternatif kebijakan berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya.

Model aktor rasional memberikan gambaran bagaimana pemerintah suatu negara menentukan suatu keputusan kebijakan melalui indikator sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pemerintah India sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan diharuskan untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di negaranya dari berbagai aspek dalam kehidupan bernegara. Beberapa faktor seperti ekonomi, politik dan sosial yang terjadi di India tak bisa dihindari dalam merumuskan kebijakan terhadap pekerja anak. Kemampuan pemerintah dengan memperhitungkan batasan-batasan yang dimiliki menjadikan pemerintah harus berpikir rasional sebelum merumuskan kebijakan.

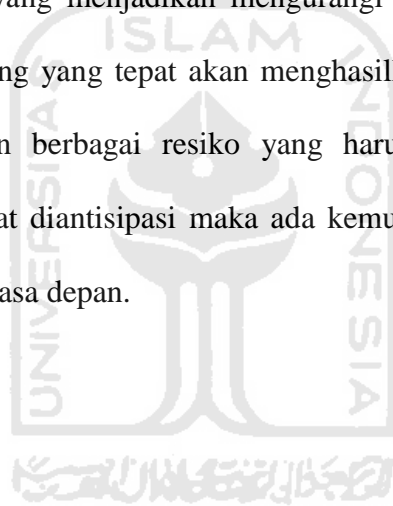
Penelitian ini telah menjawab rumusan masalah yang diangkat bahwa kebijakan pemerintah India pada tahun 2016 untuk melarang pekerja anak hanya pada sektor formal dan mengizinkan pekerja anak pada sektor informal merupakan keputusan yang paling memungkinkan jika dilihat dari sektor perekonomian pemerintahan, perekonomian masyarakat India, kemampuan pemerintah dan batasan yang mampu dicapai oleh pemerintah India dan faktor sosial yang terjadi. Kemiskinan yang dialami oleh 40% masyarakat India, faktor budaya, kemampuan sumber daya manusia, tingkat kebutuhan keluarga dan negara menjadikan kebijakan mengizinkan pekerja anak pada sektor informal menjadi rasional untuk dijalankan. Sulitnya akses untuk menjangkau secara langsung tempat dimana terjadinya praktik pekerja anak, jumlah pasti pekerja anak, kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah dan lain-lain menjadi faktor pendukung dari alasan mengapa kebijakan pemerintah mengizinkan pekerja anak menjadi rasional untuk dijalankan.

Setiap opsi kebijakan yang telah disebutkan dan dijabarkan pada bab-bab sebelumnya tentu memiliki kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Faktor ekonomi, politik dan sosial yang dijadikan tolak ukur untuk bagaimana jika kebijakan tersebut dijalankan oleh pemerintah India dan tentunya tanpa mengesampingkan faktor-faktor lainnya seperti keuangan, budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Kebijakan seperti pengembangan dan pelatihan kejuruan dan pendidikan gratis yang dijalankan oleh pemerintah India hingga saat ini dapat terus dan dijalankan dan diupayakan untuk terus mengurangi jumlah pekerja anak dan memperbaiki sumber daya manusia di India dimasa mendatang. Pilihan kebijakan

pengembangan dan pelatihan kejuruan dan pendidikan gratis untuk anak-anak di India dapat menutupi kekurangan yang dimiliki dari kebijakan mengizinkan pekerja anak pada sektor informal.

Peneliti berusaha untuk membuat pertimbangan konsekuensi menjadi serasional mungkin hingga didapatkan nantinya suatu kebijakan yang sangat rasional dari sekian opsi kebijakan yang di paparkan. Namun, tentu tidak ada kebijakan yang sempurna tanpa mengeluarkan *cost* yang sedikit dan memperoleh *benefit* yang banyak. Permasalahan pekerja anak saling tumpang tindih antara satu dan banyak hal lainnya yang menjadikan mengurangi pekerja anak adalah hal yang rumit. Kebijakan yang tepat akan menghasilkan hasil yang baik bagi pemerintah India, dengan berbagai resiko yang harus dihadapi pada setiap kebijakannya apabila dapat diantisipasi maka ada kemungkinan pekerja anak di India akan berkurang di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abhinandan, T. A., Banerje, A., Banner, N., & Dkk. (2012). Supresion of Constitutional Rights (An Open Letter to Manmohan Singh). *Economic and Political Weekly, Vol.47, No. 17*.
- Allison, G. T. (1968). Conceptual Models and The Cuban Missile Crisis: Rational Policy, Organization Proces and Bureaucratic Politics. *Harvard University*.
- Allison, G. T. (1971). Essence of Decision: Explaining the Cuban MIssile Crissis. *The Journal of Politics, Vol.34, No.2 683*.
- Arindam Nandi, A. A. (2014). Estimates of The EconomicContribution of The Bidi Manufacturing Industry in India. *Research Paper, 369-375*.
- Bharadwaj, P., Lakdawala, L. K., & Li, N. (2014). Perverse Consequences of Well-Intentioned Regulation: Evidence from India's Child Labor Ban. 4-5.
- Biswas, S. (2016). Unemploument in India. 25-26.
- Chand, K., Tiwari, R., & Phuyal, M. (2017). Economic Growth and Unemployment Rate: An Empirical Study of Indian Economy. *Journal of Indian Economy Volume 4, Issue 2, 131*.
- Chattoraj, D. A. (2012). The Pathetic Child Labour Situation and The Rehabilitation Programme in India. *Anusandhanika*.
- Chauchan, C. (2015, april 08). *Govt planning to relax laws to allow children below age 14 to work in select family businesses*. Retrieved from Hindustan Times: <https://www.hindustantimes.com/india/govt-planning-to-relax-laws-to-allow-children-below-age-14-to-work-in-select-family-businesses/story-KUFkLSVT0gXwkWHjH3UL9J.html>
- Chowdhry, G., & Beeman, M. (2001). Challenging Child labor: Transnational Activism and India's Carpet Industry. *American Academi of Political and Social Science, Col. 575, 158-175*.
- Christophe, J. J. (2019). Modi's Skill India Needs to Addres These Concerns to Solve Indian's Unemployment Problem. *Athena Information Solutions*.
- Corporation, N. S. (n.d.). Retrieved June 03 , 2020, from <https://nsdcindia.org/about-us>
- Dammert, A. C., & et.al. (2007). The Effects of Public Policy on Child Labor: Current Knowledge, Gaps, and Implications for Program Design. *Understanding Children's Work (UCW), 26*.
- Dash, B. M. (2018). Demographic Trends of Child Labour in India: Implications for Policy Reforms. *Global Business Review, 1346*.

- Desk, I. T. (2018, October 18). *India today*. Retrieved September 10, 2020, from India Today: <https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/ncs-8-1-million-job-seekers-1370511-2018-10-18>
- Development, T. N. (2009). National Skill Development Policy . 20-21.
- Edmonds, E. V. (2004). International Trade and Child Labour: Cross Country Evidence. *National Bureau of Economic Research*.
- Edmonds, E. V. (2016). Economic Growth and Child Labor in Low Income Economies. *Growth and Labour Markets in Low Income Countries Programme*, 3.
- Entrepreneurship, M. o. (2015). National Policy for Skill development and Entrepreneurship .
- Entrepreneurship, M. o. (n.d.). *Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*. Retrieved June 1, 2020, from <https://www.msde.gov.in/background.html>
- Galli, R. (2001). *The Economic Impact of Child Labour*. Retrieved May 02, 2020, from Researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/228426229_The_Economic_Impact_of_Child_Labour
- George, D. N. (2012). Corporate Governance and Child Labour. *Economic and Political Weekly*, 50-57.
- GMWatch. (2005). Mosanto Still Involved in Child Labour in India.
- Heywood, A. (2014). *Politik, Edisi ke 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jacob, J., & Misra, r. (2017, August 21). *Child labor: The Inconvenient Truth Behind India's Growth Story*. Retrieved May 02, 2020, from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/08/21/child-labor-the-inconvenient-truth-behind-indias-growth-story/>
- Jangir, S. K. (2013). Child Labour in India: Law, Policy and Program. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 167.
- Jha, M. (2008). Child Workers in India: Complex and Complexities. *Springer Science +Business Media*.
- Kaletski, E., & Prakash, N. (2016). Does Political Reservation For Minorities Affect Child Labour? Evidence From India. *World Development*, 50-69.
- Kamdar, M. (2006-2007). The Real Prize in India - U.S. Relation. *Duke University Press*, 60-63.
- Kumar, R. (2008). Child Labour A Necessary Evil for India Economy (A Case Study of wood Carving labour in Saharanpur City Synopsis). 240-241.

- Kumar, S. (2019). Shifting Epistemology of Juvenile Justice in India. *Contexto International* vol. 41.
- LabourAffairs, B. o. (2017). *Finding on the Worst Forms of Child Labour*. United States: U.S. Department of Labour.
- Lal, A. K., & Khare, S. (2004). Child Labour in India; Situation and Policy Analysis. 10.
- Lieten, G. K. (2003). Child Labour in India Disentangling Essence and Solutions. 5193.
- Literacy, D. o. (n.d.). *Right to Education*. Retrieved June 04, 2020, from <https://mhrd.gov.in/rte>
- Lyon, S. K. (2015). *Measuring Children's Work in Southeast Asia*. India: International Labour Organization.
- Maqbool, M., & Khan, M. A. (2019). Skill Development Programmes in India - A Literature review. *Research Review Journals*, 460.
- Mario Biggeri, S. M. (2009). Child Labour in Industrial Outworker Households in India. *Economic & Political Weekly*, 50.
- Maurya, O. (2017). Child Labour in India. *India Journal of Industrial Relation*.
- Ministry of Human Resource Development, D. o. (2018). *Educational Statistics At A Glance*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Statistic and Programme Implementation. (2019). *Annual Report Periodic Labour Force Survey (PLFS)*. National Statistic Office.
- Mukherjee, D., & Das, S. (2008). Role of Parental Education in Schooling and Child Labour Decision; Urban India in The Last Decade. *Soc Incic Res*.
- Mukhopadhaya, P., Bhattacharya, U., & Macmillan, C. (2012). Education For Child Labour: Evaluating the National Child Labour Policy in West Bengal, India. *Journal of Contemporary Asia* Vol. 42, No.4., 651-675.
- Nadeem, A. (2019, April 10). *The Economic Times*. Retrieved September 10, 2020, from The Economic Times: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/the-jobs-data-mystery-understanding-indias-big-crisis-in-a-fraught-poll-season/articleshow/68809081.cms?from=mdr>
- Nagar, M. (2011). A Critical Analysis of Child Labour in India. *International Journal of Current Research in Multidisciplinary(IJCRM)*, 10-11.
- Nanjunda DC, S. W. (2017). Child Labour in India a Nexus Among the State, Education and NGO? *The Indian Journal of Political Science*.

- Organization, I. L. (2004). *Child Labour (A textbook for university students)*. Geneva: International Labour Organization.
- Organization, I. L. (2017, April 13). Retrieved September 25, 2020, from International Labour Organization.
- Organization, I. L. (2017). *Methodology of The Global Estimates of Child Labour 2012-2016*. Geneva: International Labour Organization.
- Organization, I. L. (2018). An Introduction To Legally Prohibiting Hazardous Work For Children. 1-4.
- Organization, I. L. (2018). ILO Convention No. 138 At a Glance. 1-3.
- Piza, C., & Souza, A. P. (2015, December 04). *The consequences of banning child labor*. Retrieved May 02, 2020, from World Bank Blogs: <https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/consequences-banning-child-labor>
- Rammohan, A. (2014). The Trade-off Between Child labour and Schooling in India. *Education Economics, Vol. 22, No. 5*, 484-510.
- Ratnam, C. V. (2000). India Internasional Labour Standards. *Indian Journal of Industrial Relation, Vol. 35, No.4*.
- Renshon, J., & Renshon, S. A. (2008). The Theory and Practice of Foreign Policy Decision making. *International Society of Political Psychologi*, 516-517.
- Reporter, B. (2015, May 14). *Govt to allow children to work in family firms, film industry*. Retrieved from Business Standard: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-to-allow-children-to-work-in-family-firms-film-industry-115051301405_1.html
- Sarmistha Nandy, A. G. (2017). A Child Is Meant To Learn Not To Earn: Literature Review on Contending Child Labour Issues and Challenges. *International Journal of arts and Science*, 254-257.
- Sehgal, R. (2015, May 01). *Child Right*. Retrieved September 20, 2020, from Scroll.in: <https://scroll.in/article/723107/government-set-to-send-millions-of-children-back-into-exploitative-labour>
- Services, N. C. (2020, September 08). *National Career Services*. Retrieved September 10, 2020, from Government of India, Ministry Labour & Employment: <https://labour.gov.in/national-career-service>
- Sharma, A. N. (2003). Impact of Social Labelling on Child Labour in Carpet Industry. *Economic & Political Weekly*.
- Sharma, D. R. (2016). Skill Development - Imoact on Economic Growth. 109-110.

- Sheer, A., Shouping, L., Yaseen, M., & Sidra, F. (2018). *Socio-Economic Effects of Children Employment Law in Reducing Child Labor in Punjab-Pakistan*. Retrieved Mei 2, 2020, from SSOAR:
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/60205/ssoar-par-2018-3-sheer_et_al-Socio-Economic_Effects_of_Children_Employment.pdf?sequence=1
- Shubik, M. (1958). *studies and Theories of Decision Making*. SAGE Publication, *Administrative Science Quaterly*, Vol.3, No. 3. *Special Issue on Decision Making*.
- Sinha, P. (2004). *Representing Labor in India*. *Development in Practice*.
- Souza, C. P. (2015, December 04). *Consequences of Banning Child Labor*.
- Subagyo, D. A. (2015). Analisis Proses pengambilan Keputusan dalam Penyusunan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI "Implementasi Model Analisis Graham T. Allison.
- Talbot, I. (2009). *Partition of India: The Human Dimension*. *The Social History Society Volume 6, Issue 4,* 403-410.
- Tucker, L. (1997). *Child Slavery in Modern India: The Bonded Labor Problem*. *Human Rights Quaterly*.
- Veigh, T. M. (2016, December 18). *UN's ban on child labour is a 'damaging mistake*. Retrieved May 10, 2020, from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2016/dec/18/child-labour-un-ban-damaging-mistake>
- Venkateswarlu, T. (1998). *Child Labour and The Multinational Enterprises in The Third World*. *International Review of Modern Sociology*, 73-87.
- Walker, W. O. (1991). *Decision-Making Theory and Narcotic Foreign Policy: Implication for Historical Analysis*. *Oxford Journal*.
- Wasiuzzaman, S., & Wells, K. (2010). *Assembling Webs of Suppprt; Child Domestic Workers in India*. *Children & Society, Volume. 24*, 282-292.
- Wijen, F. (2015, August 26). *Banning child labour imposes naive western ideals on complex problems*. Retrieved May 10, 2020, from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/26/ban-child-labour-developing-countries-imposes-naive-western-ideals-complex-problems>
- Wintour, N. Q. (2013). *Child Labour and Education for All*. Netherlands: Education International.
- Zahid Siddique, F. J. (2019). *Policy Failure in Achieving Universal Basic Education: A Theoretical Analysis*. *The Pakistan Development Review*, 135-157.

